



PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

BELANJA JASA KONSULTANSI

PENYUSUNAN KAJIAN

INDEKS DAYA SAING DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

LAPORAN AKHIR

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

LAPORAN AKHIR

**BELANJA JASA KONSULTANSI
PENYUSUNAN KAJIAN PEMETAAN DAYA SAING DAERAH**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023**



SAMBUTAN WALIKOTA SURAKARTA

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun internasional. Kota Surakarta dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan dalam aspek sumber daya manusia, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya literasi digital masyarakat dan penerapan inovasi teknologi informasi dan digital pada setiap aspek kehidupan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi jika daya saing daerahnya juga tinggi, sehingga tingkat daya saing merupakan salah satu parameter yang dipergunakan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kota Surakarta berkolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, stakeholder, dan media selaku penggerak inovasi berperan sebagai lokomotif pertumbuhan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Untuk meningkatkan keunggulan daya saing daerah, diperlukan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui kolaborasi penta-heliks dalam peningkatan sistem inovasi daerah dengan penekanan pada kebijakan-kebijakan pembangunan, dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. Saya berharap agar Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kota Surakarta Tahun 2023 ini dapat menjadi panduan bagi semua pihak yang melaksanakan aktifitas/kegiatan pembangunan di Kota Surakarta, sehingga kita dapat mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi secara berkesinambungan.

Surakarta, Juni 2023

Walikota Surakarta

Gibran Rakabuming Raka

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya, penyusunan Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Tahun 2023 telah dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan terselesaikannya Laporan Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum sempurna sehingga masukan berupa saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Hasil dari pengukuran PSDS Tahun 2023 yang sudah dilakukan bukan merupakan angka mutlak dalam mengukur keberhasilan daya saing Kota Surakarta. Namun demikian, angka ini dapat memberikan gambaran atas kemampuan daya saing dalam hal faktor penguat, sumber daya manusia, pasar, maupun ekosistem inovasi yang dilakukan oleh semua pihak baik Pemerintah maupun Swasta.

Semoga Laporan Kajian Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Tahun 2023 ini bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, Juni 2022
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kota Surakarta

AGUNG RIYADI, S.Sos., S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19721 107 199303 1004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN WALIKOTA SURAKARTA	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan	6
C. Manfaat Kegiatan	6
D. Sasaran	6
E. Ruang Lingkup Kegiatan	6
F. Luaran Kegiatan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Daya Saing Daerah	8
B. Inovasi Daerah	10
C. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terkait Daya Saing Daerah	12
D. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Populasi dan Sampel	29
C. Alat Analisis	29
D. Metode Pelaksanaan Pekerjaan	31
E. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan.....	31
F. Keluaran/ Output	31
G. Sistematika Pelaporan	31

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA.....	35
A. Keadaan Terkini	33
B. Arah Kebijakan Pembangunan	42
 BAB V ANALISIS DAYA SAING KOTA SURAKARTA	 47
A. Analisis Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2023.....	47
B. Perkembangan Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2022-2023	54
 BAB VI SOLUSI MENYELURUH	 58
A. Agenda Kerjasama dan Kolaborasi (Internal dan Eksternal Daerah)	58
B. Prioritas Program Penyusunan dan Pelaksanaan Penguatan PDSD	62
 REFERENSI.....	 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skor Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2018-2022	4
Gambar 1.2	Aspek Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kota Surakarta 2022	5
Gambar 4.1	Peran Kota Surakarta terhadap Wilayah Subosukawonosraten.....	36
Gambar 4.2	Daya Saing Kota Surakarta dibandingkan dengan Kota di Jawa Tengah Tahun 2022.....	37
Gambar 4.3	Daya Saing Surakarta Dibanding Wilayah Lain di Subosukawonosraten Tahun 2022	37
Gambar 4.4	Aspek Capaian Pembangunan Kota Surakarta	41
Gambar 4.5	Komponen Pembentuk Andalan Kota Surakarta	44
Gambar 5.1	Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2023 berdasarkan Dimensi	55
Gambar 5.2	Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2023 berdasarkan Pilar	56
Gambar 5.3	Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2023 berdasarkan Aspek	56
Gambar 5.4	Skor Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2018-2023	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skor dan Kategori IID	11
Tabel 2.2	List Dokumen Pendukung Pemetaan Daya Saing Daerah	24
Tabel 5.1	Proyeksi Skor Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan Indikator	48
Tabel 5.2	Proyeksi Peningkatan Skor Daya Saing Kota Surakarta 2022- 2023 Berdasarkan Dimensi	55
Tabel 5.3	Proyeksi Peningkatan Skor Daya Saing Kota Surakarta 2022- 2023 Berdasarkan Pilar	56
Tabel 5.4	Proyeksi Peningkatan Skor Daya Saing Kota Surakarta 2022- 2023 Berdasarkan Aspek	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cakupan daya saing di tingkat regional memasukkan berbagai faktor tolok ukur termasuk faktor pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, konvergensi dan divergensi regional, keragaman, serta dampak dari situasi regional (Chrobocińska, 2021). Luasnya cakupan daya saing regional kemudian dapat dimaknai secara luas bahwa daya saing berkaitan erat dengan pembangunan daerah serta stimulasi-stimulasi yang menyertainya, sehingga faktor daya saing mendorong pada faktor pembangunan regional begitu pula sebaliknya. Lebih dari itu, beberapa literatur menjadikan daya saing ini sebagai penanda keberlanjutan (*competitiveness index as evidence of sustainability*) bagi suatu cakupan geografis termasuk kota, kabupaten, provinsi dan negara (Judrupa, 2021; Korauš, Havierníková, Gombár, Černák, & Felcan, 2020; Nogueira & Madaleno, 2023). Konektifitas yang kuat antara daya saing, pembangunan, dan paradigma keberlanjutan ini kemudian dijadikan salah satu landasan penyelenggaraan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia.

Pelaksanaan anual Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan acuan utama *Global Competitiveness Index* yang dilakukan oleh *World Economic Forum*, meskipun tidak menutup sumber referensi pengukuran lain seperti *Asia Competitiveness Institute (ACI)* ataupun *Global Competitiveness Forum*. Pemetaan Daya Saing Daerah mengukur kemampuan bersaing satu region (provinsi/ kota/ kabupaten) terhadap region lain yang disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang baik di tingkat nasional maupun global (Rusnita, Yulianto, & Albab, 2022). Isu yang diangkat dalam pengukuran daya saing daerah oleh disesuaikan dengan perubahan pada tingkat yang lebih luas, seperti pada tahun 2019 yang mengangkat isu utama Polarisasi perdagangan global (Berger et al., 2021). Kemudian pada tahun 2020 hingga 2022 berfokus pada isu kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi global *Covid-19* (Mefi & Asoba, 2021). Menambahi terhadap diangkatnya isu-isu di tahun sebelumnya, daya saing tahun 2022 selain berfokus pada pemulihan atas dampak pandemi, juga dipengaruhi oleh 3 isu utama lainnya meliputi, lingkungan, geopolitik, dan teknologi digital (Berger et al., 2021; Mefi & Asoba, 2021). Sementara itu, untuk tahun 2023 *World Economic Forum* memprediksi

bahwa di tahun 2023, daya saing suatu daerah akan ditentukan oleh kemampuan menghadapi kombinasi antara risiko lama dan tantangan di masa depan antara lain;

1. Krisis energi dan pangan global

Daya saing regional dan krisis energi dan pangan global saling terkait karena ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi dan sumber daya pangan berdampak langsung pada kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

2. Mengatasi risiko resesi

Daya saing daerah memainkan peran penting dalam mengatasi risiko resesi karena hal itu menentukan ketahanan dan kemampuan suatu daerah untuk mengarungi kemerosotan ekonomi. Daerah dengan faktor daya saing yang kuat, seperti industri yang terdiversifikasi, tenaga kerja terampil, infrastruktur yang kuat, dan kebijakan yang mendukung, lebih siap menghadapi resesi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mendorong daya saing regional, pemerintah dapat mengurangi risiko resesi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas dan kemakmuran kawasan secara keseluruhan.

3. Inovasi dan ketahanan sektor swasta

Daya saing daerah dan inovasi sektor swasta saling berhubungan. Daya saing suatu wilayah bergantung pada pengembangan lingkungan yang mendorong inovasi dan kemampuan beradaptasi di dalam sektor swasta. Ini memupuk kewirausahaan, menarik investasi dalam teknologi baru, dan mendukung penelitian dan pengembangan. Pada gilirannya, inovasi sektor swasta mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memungkinkan bisnis beradaptasi dengan perubahan pasar. Hubungan simbiosis antara daya saing daerah dan inovasi sektor swasta mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran jangka panjang.

4. Kebebasan sipil dan hak asasi manusia

Menjunjung tinggi kebebasan sipil dan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari daya saing regional. Daerah yang memprioritaskan dan menjaga kebebasan sipil, kesetaraan, dan hak asasi manusia menciptakan lingkungan yang mendorong kohesi sosial, inklusivitas, dan inovasi. Menghormati hak individu, kebebasan berekspresi, dan keragaman memupuk tenaga kerja yang terampil dan terlibat,

menarik individu berbakat, dan mempromosikan budaya kreativitas dan kewirausahaan. Korelasi antara daya saing regional dan penegakan kebebasan sipil dan hak asasi manusia terletak pada penguatan timbal balik mereka, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran keseluruhan kawasan.

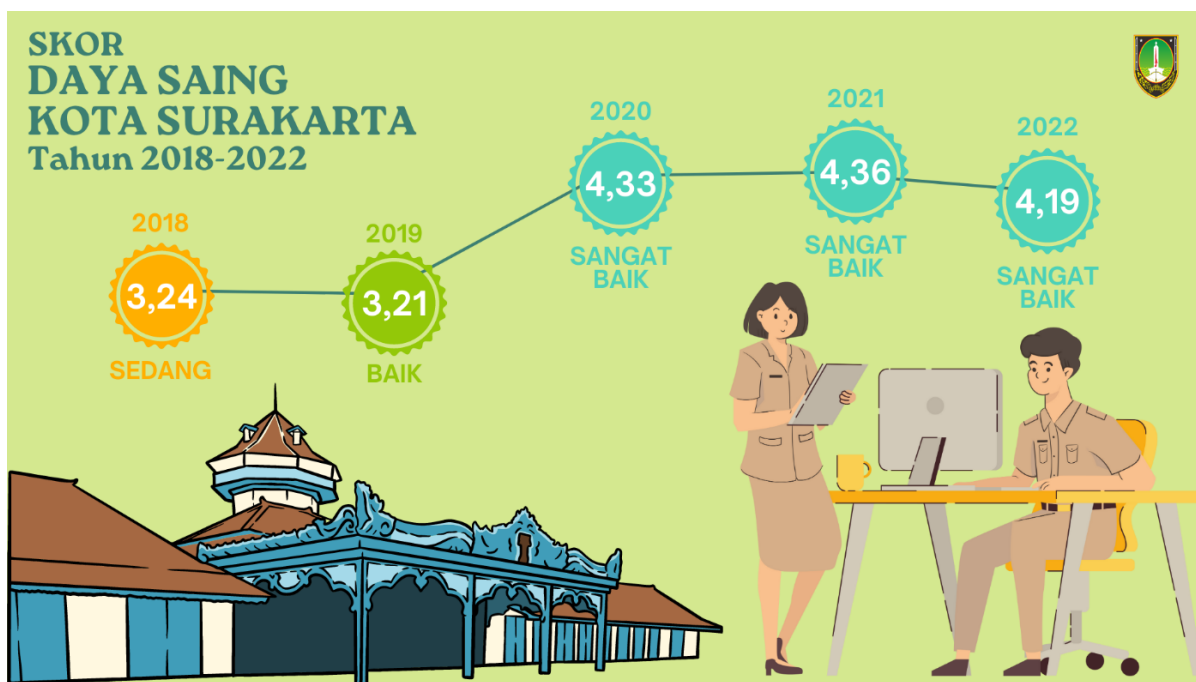
5. Risiko geopolitik di dunia yang terglobalisasi

Adanya risiko geopolitik, seperti ketidakstabilan politik, konflik perdagangan, dan ancaman keamanan, dapat berdampak signifikan terhadap daya saing suatu kawasan. Ketidakpastian dan gangguan dalam hubungan global dapat menghambat investasi, mengganggu rantai pasokan, dan menciptakan volatilitas ekonomi. Di sisi lain, kawasan yang secara efektif mengelola dan memitigasi risiko geopolitik dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan mendorong stabilitas, menarik investasi, dan memanfaatkan peluang yang muncul. Kemampuan untuk menavigasi dan mengatasi risiko geopolitik menjadi aspek penting dari daya saing regional dalam lanskap global yang saling berhubungan.

Tolok ukur daya saing dengan menggunakan faktor penguat, sumber daya manusia, faktor pasar, dan ekosistem inovasi pada PDSD BRIN sejauh ini sejalan dengan isu-isu global.

Surakarta menjadi salah satu kota berdaya saing dalam 4 tahun terakhir pada PDSD versi BRIN. Tahun 2019 Surakarta memperoleh Skor 7,71/12,00 menjadi Kota/ Kabupaten berdaya saing peringkat ke-5 secara nasional. Keniaikan peringkat terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 di mana Kota Surakarta menempati peringkat 1 secara nasional dalam PDSD BRIN yaitu 4,33 di tahun 2020, 4,36 di tahun 2021, dan 4,19 di tahun 2022 dari skor maksimal 5,00. Pada tahun 2022 Kota Surakarta memperoleh predikat Juara 1 dalam hal Faktor Pasar, mengindikasikan bahwa Kota Surakarta telah menjalankan fungsinya sebagai Daerah Perdagangan dan Transit yang menyangga produk-produk dari wilayah sekitarnya termasuk Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosukawonosraten) serta pada cakupan lebih luas Jogja dan Semarang (Joglosemar). Kondisi ini merupakan tantangan bagi Surakarta untuk bertahan dan terus meningkatkan kemampuan daya saing di tahun 2023. Potensi daya saing berkelanjutan Surakarta masih sangat besar mengingat isu global terkait krisis energi dan pangan, risiko resesi, inovasi dan ketahanan sektor swasta, kebebasan sipil dan HAM, serta risiko geopolitik dinilai sangat relevan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yaitu "*Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang*

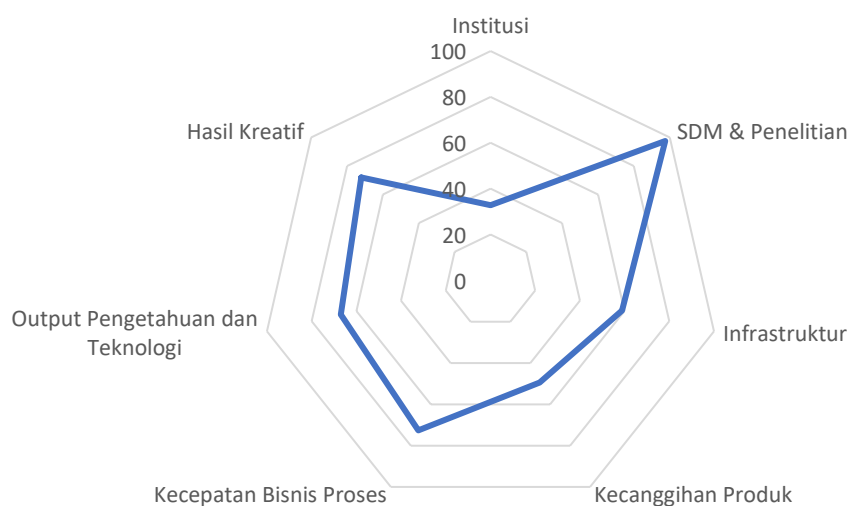
Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera". Terlebih lagi, penekanan dan urgensi daya saing Kota Surakarta dituangkan secara langsung dalam misi RPJMD butir 1-7 yaitu penguatan dalam hal dengan daya saing, tata kelola pemerintahan, kolaborasi antar sektor dan paradigma ekonomi berkelanjutan. Strategi peningkatan daya saing daerah memberikan pendekatan yang ditargetkan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan daerah, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang, sedangkan RPJMD berfungsi sebagai peta jalan yang komprehensif untuk mencapai tujuan jangka menengah dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan menyelaraskan strategi ini, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa prakarsa daya saing regional terintegrasi ke dalam agenda pembangunan yang lebih luas, yang mengarah pada alokasi sumber daya yang dioptimalkan, upaya terkoordinasi, dan implementasi kebijakan dan proyek yang lebih efektif dan berdampak. Penyelarasan ini pada akhirnya menghasilkan peningkatan kinerja ekonomi dan peningkatan standar hidup di wilayah Kota Surakarta.



Gambar 1.1 Skor Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2018-2022

Meskipun Surakarta telah menemukan relevansi antara RPJMD dengan kebijakan pembangunan nasional dan isu-isu global tahun 2023, implementasi kemampuan bersaing Surakarta dengan menggunakan tolok ukur Pemetaan Daya Saing Daerah Berkelanjutan tetap mendesak untuk mendapat perhatian lebih oleh lintas sektor. Terlebih lagi, pada tahun

2023 Kota Surakarta dihadapkan pada dorongan untuk menjadi kota dengan pemerintahan yang inovatif, diukur melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan salah satu komponen pendukung pada aspek “Ekosistem Inovasi”, sekaligus aspek “*Enabling Environment*” dalam PDSD. Sebagai Kota yang diproyeksikan menjadi Kota Inovatif, Surakarta hanya mampu meraih skor 59,26 dimana aspek Institusi dan Kecanggihan Produk masih berada pada skor di bawah 50 yaitu masing-masing 32,81 dan 49,49 serta aspek Infrastruktur yang masih berada pada skor 58,87 dari skor maksimum 100.



Gambar 1.2 Aspek Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kota Surakarta 2022

Penguatan aspek Ekosistem Inovasi dan Enabling Environment PDSD melalui IID memerlukan adanya kesepahaman oleh pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah Kota Surakarta, sektor industri, masyarakat, akademik, bahkan media masa sehingga tercipta kolaborasi yang berjalan pada jalur yang sama yaitu keunggulan kompetitif Kota Surakarta. Pemetaan Daya Saing Daerah dan pendampingan desk IID merupakan suatu keharusan untuk dipelajari dan dirumuskan bersama secara mendalam dan komprehensif melibatkan kelima pemangku kepentingan. Meskipun bukan sebagai inisiator tunggal dan menutup peran pemangku kepentingan yang lain, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Surakarta merupakan perangkat daerah yang

menyelenggarakan dan menghimpun seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun Kajian Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Kota Surakarta Tahun 2023.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Menganalisis perbandingan dana rah perubahan daya saing Kota Surakarta tahun 2018-2023;
2. Menganalisis daya saing dan peran Kota Surakarta tahun 2023 terhadap wilayah Subosukawonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional;
3. Menganalisis permasalahan dan kelemahan daya saing daya saing Kota Surakarta melalui *benchmarking* pada daerah lain;
4. Mendampingi penguatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Surakarta sebagai penunjang utama peningkatan daya saing Kota Surakarta; dan
5. Penyusunan rekomendasi kebijakan atau *policy brief* terkait dengan hasil PDSD Kota Surakarta tahun 2023.

C. Manfaat Kegiatan

Kajian ini disasarkan untuk memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai dasar penyusunan PDSD Tahun 2023;
2. Sebagai rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil PDSD Kota Surakarta Tahun 2023; dan
3. Sebagai dasar analisis perkembangan daya saing Kota Surakarta dari tahun 2022-2023.

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyusunan kajian ini adalah:

1. Tersusunnya rekomendasi untuk peningkatan daya saing Kota Surakarta;
2. Terukurnya skor PDSD Kota Surakarta tahun 2023; dan
3. Tersusunnya analisis perkembangan daya saing Kota Surakarta dari tahun 2022-2023

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup penyusunan kajian Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2023 antara lain adalah:

1. Analisis perbandingan dan arah perubahan daya saing Kota Surakarta tahun 2022-2023;
2. Analisis daya saing Kota Surakarta terhadap wilayah Subosukawonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional;
3. *Benchmarking* daya saing Kota Surakarta dengan daerah lain;
4. Pendampingan peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai penunjang PDSD Kota Surakarta Tahun 2023; dan
5. Rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil analisis PDSD Kota Surakarta tahun 2023.

F. Luaran Kegiatan

Keluaran atau *output* yang diharapkan dari hasil kegiatan penyusunan Kajian Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Surakarta ini adalah dokumen yang memuat:

1. Laporan Kajian Pengukuran Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2023;
2. Proyeksi skor daya saing Kota Surakarta tahun 2024; dan
3. Rekomendasi kebijakan atau *policy brief* terkait hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Daya Saing Daerah

Keberlanjutan merupakan salah satu prioritas utama dalam lingkup strategi, rencana pembangunan, dan dokumen-dokumen normatif lainnya di berbagai negara yang kemudian kebanyakan diadaptasikan pada skala regional termasuk kota atau kabupaten (Chrobocińska, 2021). Konsep keberlanjutan tersebut kemudian memiliki ketereratan dengan daya saing. Peningkatan daya saing suatu kota dapat mengarah pada pembangunan berkelanjutan bagi regional provinsi maupun negara, walaupun daya saing sebuah provinsi dan negara tidak serta merta dicapai melalui tingkat pembangunan yang sama persis antar masing-masing daerah. Oleh karena itu, menjadi tugas yang sangat penting untuk memperhatikan disparitas antar wilayah, sekaligus menjadikan masing-masing wilayah menjadi tempat tinggal dan lahan menarik bagi investor dengan menonjolkan keunggulan masing-masing wilayah serta mempertimbangkan faktor penghambat perkembangan suatu wilayah tertentu. Identifikasi keunggulan dan faktor penghambat inilah yang menjadi tolok ukur kemampuan bersaing suatu daerah (Judrupa, 2021). Dengan demikian secara esensial daya saing bukan hanya masalah ekonomi makro, melainkan kemampuan bersaing di tingkat regional, perkotaan dan lingkup yang lebih lokal lagi (Parjaman, Soedarmo, & Enas, 2019).

Secara definitif daya saing dibedakan antara yang berpusat pada biaya dan yang berpusat pada produktivitas (Ketels, 2017). Daya saing yang berpusat pada biaya tergantung pada biaya produksi unit di tempat tertentu; biaya produksi per unit yang rendah memungkinkan daerah untuk bersaing di pasar global. Sebaliknya, daya saing produktivitas bergantung pada kapasitas suatu tempat untuk menambah nilai berdasarkan faktor produksi, dengan kata lain seberapa produktif tempat itu. Faktor produktif, seperti tenaga kerja dan modal, berpindah antar daerah dan terjadi transmisi dan sinergi antar daerah, sehingga struktur ekonomi daerah berbeda dengan struktur ekonomi nasional. Dengan kata lain, wilayah tidak sesuai dengan versi ekonomi nasional yang lebih kecil, karena mereka berbeda secara struktural.

Definisi daya saing dalam perspektif modern, secara implisit dapat dilihat melalui kacamata “daya saing perusahaan”. Dengan demikian “daya saing negara” atau “daya saing daerah” terdapat korelasi bahwa di sana ada hubungan antara konsep kinerja

perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan konsep bahwa kapasitas suatu negara atau daerah dapat menghasilkan kesejahteraan bagi penduduknya (Catalán, 2021). Sementara itu, *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan daya saing negara atau daerah sebagai “seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara atau daerah” dan mengakui bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Schwab, 2018). Bagi *IMD World Competitiveness Center*, daya saing negara atau daerah didefinisikan sebagai “kemampuan suatu bangsa atau region untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang menopang penciptaan nilai lebih bagi perusahaannya dan lebih banyak kemakmuran bagi rakyatnya” (Schwab, 2018).

Referensi-referensi terdahulu mengakui bahwa banyak penelitian tentang daya saing telah difokuskan pada skala nasional, tanpa mengakui perbedaan internal antar wilayah, yang ada di semua negara. Ia mengemukakan bahwa komponen utama yang menentukan kinerja ekonomi adalah komponen regional, seperti input khusus, infrastruktur, pendidikan angkatan kerja, institusi yang akan mendorong aglomerasi perusahaan dalam bentuk klaster (Berger et al., 2021; Chrobocińska, 2021; Judrupa, 2021).

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu perekonomian daripada kemampuan sektor swasta atau perusahaan.
- b) Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

- c) Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi.” Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada perekonomian yang tertutup mempertimbangkan hal-hal diatas, akhirnya PPSK-BI mendefenisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Rusnita et al., 2022).

Kesimpulannya, daya saing daerah berfungsi sebagai indikator penting stabilitas ekonomi, keberlanjutan, dan daya tarik bagi investor. Kemampuan suatu kawasan untuk bersaing secara efektif di pasar global tidak hanya menentukan pertumbuhan dan kemakmuran ekonominya, tetapi juga mencerminkan kemampuannya untuk menghadapi fluktuasi ekonomi dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Suatu wilayah yang mengembangkan lingkungan yang kompetitif lebih cenderung menarik investasi, merangsang inovasi, dan menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Investor tertarik ke daerah dengan keunggulan kompetitif yang kuat karena menawarkan potensi pengembalian investasi yang lebih tinggi dan iklim bisnis yang menguntungkan. Dengan memprioritaskan daya saing regional, pembuat kebijakan dapat membangun landasan yang kuat untuk stabilitas ekonomi jangka panjang dan pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus memberikan kepercayaan dan insentif kepada investor untuk berkontribusi pada pembangunan kawasan.

B. Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) mengukur dan mendorong kompetisi positif antar pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran IID merupakan indikator tingkat pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kegiatan IID dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 388 ayat (9) dan (11) bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”.

Hasil pengukuran IID adalah Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award/ IGA*). Adapun tujuan dari diberikannya IGA antara lain adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan quality control akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tabel 2.1 Skor dan Kategori IID

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, 2022

Regional Innovation Index atau IID dan Daya Saing Daerah saling terkait erat dan harus berjalan seiring untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. IID mengukur kemampuan suatu daerah untuk mendorong inovasi melalui berbagai indikator seperti investasi penelitian dan pengembangan (litbang), paten, dan kolaborasi antara akademisi dan industri. Inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing suatu wilayah dengan mendorong produktivitas, menarik bakat, dan mendorong terciptanya industri dan teknologi baru. Oleh karena itu, terdapat korelasi yang kuat antara IID suatu daerah dan daya saingnya secara keseluruhan, karena daerah dengan kapasitas inovasi yang tinggi cenderung memiliki keunggulan kompetitif dalam ekonomi global.

Namun, penting untuk menyadari bahwa daya saing daerah tidak semata-mata bergantung pada inovasi, dan serangkaian faktor yang lebih luas harus dipertimbangkan.

Infrastruktur, akses ke pasar, kualitas kelembagaan, dan ketersediaan tenaga kerja terampil merupakan beberapa komponen tambahan yang berkontribusi terhadap daya saing suatu daerah. Sementara inovasi memberikan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, penting untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan yang mendukung dan memelihara inisiatif inovasi. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur fisik, kebijakan dan peraturan yang mendukung, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, dan pengembangan tenaga kerja terampil. Dengan mengakui korelasi yang kuat antara IID dan daya saing daerah dan mengatasi berbagai aspek daya saing, pembuat kebijakan dapat mendorong ekosistem yang mendorong baik inovasi maupun daya saing ekonomi secara keseluruhan, yang mengarah pada keberhasilan dan kemakmuran jangka panjang bagi daerah tersebut.

C. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terkait Daya Saing Daerah

Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta menjadikan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2021-2026 sebagai pegangan utama. Adapun kebijakan terkait dengan isu strategis pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah:

1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal

Isu strategis berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan adalah:

- 1) Pemetaan sumber daya aparatur berbasis sistem merit
- 2) Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat
- 4) Optimalisasi layanan fungsi DPRD
- 5) Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektornik
- 6) Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- 7) Penguatan kerja sama regiona, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan kelompok masyarakat
- 8) Pemanfaatan teknologi informasi daalam birokrasi dan pelayanan publik
- 9) Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran, dan pemanfaatan inovasi daerah
- 10) Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi

2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter, unggul dan tangguh

Isu strategi ini terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari banyak aspek. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, pengintegrasian falsafah budaya Jawa ke dalam kehidupan bermasyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara menyeluruh adil dan merata. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga
- 3) Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing
- 4) Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja
- 5) Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak
- 6) Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- 7) Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan
- 8) Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya

3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan

Perkembangan ekonomi dalam era industri 4.0 dibutuhkan sebagai salah satu perkembangan industri yang harus diikuti. Seiring dengan perkembangan era industri 4.0, Kota Surakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan aspek perkembangan sejarah kuno dan kini yang telah terjadi, untuk melihat kondisi nanti perkembangan dan daya saing ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan era industri 4.0 yang terjadi mengakibatkan perkembangan dunia digital/cyber berlangsung secara cepat. Penguatan daya saing ekonomi dalam era industri 4.0 ini juga diharapkan mampu mengisi ruang-ruang lahan yang direncanakan dalam rencana pola ruang terutama dalam sektor industri dan perdagangan jasa. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, Wiskulja dan Ekonomi Digital berbasis konsep Eco Cultural City

- 2) Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan Smart City
- 3) Penguatan budaya cinta kota dan produk kota bagi generasi muda sebagai duta daya saing ekspor
- 4) Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan
- 5) Peningkatan daya tarik investasi
- 6) Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi
- 7) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh

Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Pembangunan infrastruktur kota diamanatkan kota yang berkarakter adalah kota yang memiliki akar budaya lokal. Kota yang memperhatikan budaya-budaya lokal, memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan budaya lokalnya. Perincian isu infrastruktur pendukung Kota Budaya adalah sebagai berikut:

- 1) Isu infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya
- 2) Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi
- 3) Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat
- 4) Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim

5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan kota yang kondusif

Perincian isu pemenuhan hak dasar dan mempertahankan kekondusifan daerah terjabarkan sebagai berikut:

- 1) Isu perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
- 2) Penguatan pencegahan risiko gangguan daerah dan manajemen risiko bencana

D. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah

Penilaian IDSD tahun 2023 ditetapkan 4 aspek yang diklasifikasikan menjadi 12 pilar. Empat aspek Indeks Daya Saing Daerah antara lain aspek ekosistem inovasi, aspek penguat, aspek sumber daya dan aspek pasar menurut Kemenristekbrin (2021). Keempat aspek ini diperinci menjadi 12 pilar , 23 dimensi dan 97 indikator pengukuran yang menyertainya. Keempat aspek pokok yang dijadikan acuan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah meliputi:

1. Aspek Ekosistem Inovasi

1.1. Pilar Dinamika Bisnis

1.1.1. Dimensi Regulasi

Regulasi dan Reformasi Birokrasi (kemudahan izin usaha dan investasi) yang memiliki dampak pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah terdiri dari beberapa pertanyaan berikut ini.

- 1) Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?
- 2) Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri?
- 3) Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?
- 4) Berapa persentase usaha/industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?

1.1.2. Dimensi Kewirausahaan

Dimensi kewirausahaan untuk mengukur mengenai pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar. Dampak dari dimensi kewirausahaan ini terlihat pada perubahan PAD, APBD, PDRB, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi pada dimensi kewirausahaan antara lain:

- 5) Bagaimana Presentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?
- 6) Bagaimana presentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)
- 7) Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO)
- 8) Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar? (dalam bentuk sertifikat ISO)
- 9) Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?

10) Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?

1.2. Pilar Kapasitas Inovasi

1.2.1. Dimensi Interaksi dan Keberagaman

Memaksimalkan potensi daerah (Sinergi ABGCM) untuk memberi dampak pada pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Dimensi kewirausahaan pada pilar kapasitas inovasi terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu:

- 11) Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?
- 12) Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?
- 13) Berapa jumlah Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)
- 14) Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?
- 15) Berapa jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)
- 16) Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun terakhir?

1.2.2. Dimensi Penelitian dan Pengembangan

Membangun kapasitas inovasi daerah penciptaan budaya inovasi daerah berkelanjutan. Indikator dari dimensi penelitian dan pengembangan pada pilar kapasitas inovasi yaitu:

- 17) Berapa jumlah Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?
- 18) Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual

(paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?

- 19) Berapa Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?
- 20) Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?
- 21) Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?
- 22) Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian dari perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?
- 23) Berapa persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?
- 24) Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)
- 25) Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?
- 26) Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?

1.2.3. Dimensi Komersialisasi

Komersialisasi inovasi dari produk unggulan daerah. Dimensi ini terdiri dari 2 indikator yaitu:

- 27) Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?
- 28) Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?

1.3. Pilar Kesiapan Teknologi

1.3.1. Dimensi Telematika

Kesiapan Infrastruktur digital dan informatika yang berdampak pada kapasitas SDM era Digital. Indikator dimensi ini adalah:

- 29) Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?
- 30) Berapa Proporsi rumah tangga dengan akses internet?

1.3.2. Dimensi Teknologi

Tingkat Kesiapan Inovasi yang berdampak terhadap komersialisasi Inovasi.
Indikator dimensi ini antara lain:

31) Berapa produk inovasi teknologi yang sudah dikomersialisasikan?

2. **Aspek Penguat/ *Enabling Environment***

2.1. Pilar Kelembagaan

2.1.1. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik (*Good Governance*) yaitu tingkat partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder* (pelayanan) dan konsensus (kesepakatan bersama)in. Pencapaian indikatorf dimensi tata kelola pemerintah ini akan memberikan dampak pada tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, dan penciptaan lapangan kerja. Indikator dimensi tata kelola pemerintah pada pilar kelembagaan antara lain:

32) Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?

33) Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?

34) Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?

35) Apakah hasil hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?

36) Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?

37) Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi

2.1.2. Dimensi Keamanan dan Ketertiban

Penegakan supremasi hukum dalam mendukung Good Governance demi terciptanya situasi yang kondusif dalam mendukung program pembangunan daerah. Dimensi keamanan dan ketertiban terdiri dari beberapa indicator yaitu:

38) Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan?

39) Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)?

2.2. Pilar Infrastruktur

2.2.1. Dimensi Infrastruktur Transportasi

Mengukur kesiapan infrastruktur jalan di daerah dalam kondisi baik untuk dapat melihat keuntungan/kerugian baik secara materiil dan non materiil. Indikator dimensi ini terdiri dari:

40) Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor?

41) Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?

2.2.2. Dimensi Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan

Mengukur kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan infrastruktur primer dan kesehatan masyarakat. Indikatornya yaitu:

42) Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak?

43) Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?

44) Berapa rasio elektrifikasi?

2.3. Pilar Perekonomian Daerah

2.3.1. Dimensi Keuangan Daerah

Mengukur kemampuan keuangan daerah untuk melihat tingkat keberlanjutan pembangunan daerah. Dimensi ini terdiri dari beberapa indikator yaitu:

45) Berapa besar pertumbuhan ekonomi?

46) Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah?

47) Berapa persentase penurunan/peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?

48) Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya?

2.3.2. Dimensi Stabilitas Eknoomi

Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada stabilitas Ekonomi, Sosial, Hukum dan Keamanan. Indikator dari dimensi ini yaitu:

49) Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?

50) Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data Terakhir?

- 51) Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data Terakhir?
- 52) Berapa Persentase peningkatan/penurunan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?
- 53) Berapa Persentase Angka Kemiskinan dari tahun terakhir?
- 54) Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP)?
- 55) Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun terakhir?

3. Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital*

3.1. Pilar Kesehatan

3.1.1. Dimensi Kesehatan

Mengukur tingkat kesehatan masyarakat yang berdampak pada kesiapan sumber daya manusia. Indikator dimensi kesehatan ini adalah:

- 56) Berapa Persentase balita gizi buruk tahun terakhir?
- 57) Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting tahun terakhir?
- 58) Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?
- 59) Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir?
- 60) Berapa nilai angka harapan hidup tahun terakhir?
- 61) Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?
- 62) Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?
- 63) Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk tahun terakhir?

3.2. Pilar Pendidikan dan Keterampilan

3.2.1. Dimensi Pendidikan

Mengukur tingkat pendidikan formal yang berdampak pada kapasitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 64) Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?
- 65) Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?

- 66) Berapa Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi?
- 67) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?
- 68) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk?
- 69) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?
- 70) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?

3.2.2. Dimensi Keterampilan

Membangun kualitas SDM terampil untuk meningkatkan kapasitas SDM yang berdaya saing. Indikator dimensi keterampilan pada pilar ini yaitu:

- 71) Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa Sekolah Menengah kejuruan?
- 72) Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?
- 73) Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?
- 74) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?

4. **Aspek Pasar/Market**

4.1. Pilar Efisiensi Pasar Produk

4.1.1. Dimensi Kompetisi Dalam Negeri

Kondisi iklim usaha, persaingan dan investasi (pelaku pasar) yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 75) Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)
- 76) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif?
- 77) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?

78) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?

4.1.2. Dimensi Pajak dan Retribusi

Kontribusi pajak dan retribusi untuk PAD untuk melihat dampaknya terhadap keseimbangan keuangan Daerah. Dimensi ini memiliki beberapa indikator antara lain:

79) Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

80) Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

4.1.3. Dimensi Stabilitas Pasar

Stabilitas perekonomian Daerah untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap keseimbangan perekonomian Daerah. Dimensi stabilitas pasar terdiri dari dua indikator yaitu:

81) Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?

82) Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?

4.2. Pilar Ketenagakerjaan

4.2.1. Dimensi Ketenagakerjaan

Dimensi ketenagakerjaan bisa dilihat dari kondisi angkatan kerja (jumlah pengangguran), kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja dan kesetaraan gender. Dimana dimensi ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, stabilitas perekonomian dan stabilitas keamanan ketertiban. Dimensi ini terdiri dari tiga indikator yaitu:

83) Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK))?

84) Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)

85) Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?

4.2.2. Dimensi Kapasitas Tenaga Kerja

Membangun kapasitas SDM yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, stabilitas perekonomian dan stabilitas keamanan ketertiban. Dimensi ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 86) Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?
- 87) Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?
- 88) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?

4.3. Pilar Akses Keuangan

4.3.1. Dimensi Akses Keuangan

Kemudahan akses modal/keuangan yang berdampak pada tumbuhnya unit-unit usaha dan investasi. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 89) Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?
- 90) Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?
- 91) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?
- 92) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?
- 93) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?
- 94) Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?

4.4. Pilar Ukuran Pasar

4.4.1. Dimensi Ukuran Pasar

Dimensi dan luas Pasar yang berdampak peningkatan volume perdagangan dan ekspansi pasar. Indikator dimensi ukuran pasar yaitu:

- 95) Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)
- 96) Bagaimana pertumbuhan nilai ekspor?
- 97) Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah Provinsi (triliun rupiah)?

Tabel 2.2 List Dokumen Pendukung Pemetaan Daya Saing Daerah

No.	Indikator	Kebutuhan Data
1	Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?	Regulasi yang Dijadikan Pedoman dalam Menentukan Besaran Biaya Administrasi Perijinan Industri
2	Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri?	Rata-Rata Durasi Waktu Pengurusan Administrasi Perijinan Usaha
3	Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Usaha dari Tahun Sebelumnya
4	Berapa persentase usaha/industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?	Persentase Industri yang Memanfaatkan Kebijakan Insentif Pajak
5	Bagaimana Presentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah
6	Bagaimana presentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Besar
7	Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO)	Sistern Manajemen Produksi Hasil Industri Kecil dan Menengah (SOP, ISO, dll)
8	Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar? (dalam bentuk sertifikat ISO)	Sistem Manajemen Produksi Hasil Industri Besar (SOP, ISO, dll)
9	Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?	Jumlah Perusahaan Sosial yang Terdaftar oleh Pemerintah Daerah
10	Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?	Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi/ Startup yang terdaftar di Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi, Balitbangda dan Swasta
11	Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?	Implementasi Program Sistem Inovasi Daerah
12	Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?	Keberadaan dan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah
13	Berapa jumlah Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	Jumlah Kolaborasi Perguruan Tinggi, Lembaga dan Litbang dengan Pemerintah Daerah untuk Program Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
14	Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah Perjanjian Kerjasama Antara Industri/ Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah untuk Program Pengembangan

No.	Indikator	Kebutuhan Data
		Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
15	Berapa jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	Jumlah Kolaborasi Perguruan Tinggi, Litbang. Industri dan Pemerintah Daerah (Triple-Helix) Bidang Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
16	Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun terakhir?	Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun Terakhir
17	Berapa jumlah Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?	Jumlah Artikel Ilmiah Jurnal yang Dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang Dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi/ Internasional Selama 3 Tahun Terakhir
18	Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir
19	Berapa Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah Hak Cipta, Merek, Paten, dan Rahasia Dagang yang sudah Didaftarkan
20	Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?	Jumlah Paten yang Telah Dimanfaatkan Industri
21	Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?	Persentase Anggaran Penelitian dan Pengembangan terhadap Total APBD
22	Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian dari perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbasis Produk Unggulan Daerah terhadap Jumlah Penelitian
23	Berapa persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbasis Produk Unggulan Daerah terhadap Jumlah Penelitian
24	Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)	Peringkat Perguruan Tinggi di Daerah Secara Nasional (Diambil yang Tertinggi)
25	Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?	Jumlah Dunia Usaha dan Industri yang Memiliki Unit Penelitian dan Pengembangan
26	Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?	Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan

No.	Indikator	Kebutuhan Data
27	Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?	Jumlah Perguruan Tinggi dan Institusi dan Kelitbangan di Daerah yang Telah Melakukan Komersialisasi Inovasi
28	Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?	Kondisi Technopark dan Pusat Unggulan Iptek
29	Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Smartphone
30	Berapa Proporsi rumah tangga dengan akses internet?	Proporsi Rumah tangga dengan Akses Internet
31	Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan?	Jumlah Inovasi Teknologi di Daerah
32	Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?	Hasil Penetapan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional
33	Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Hasil Indeks Reformasi Birokrasi
34	Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
35	Apakah hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
36	Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tingkat Provinsi
37	Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi?	Indeks Demokrasi Indonesia di Tingkat Provinsi
38	Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)?	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
39	Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)?	Persentase Penegakan Peraturan Daerah
40	Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor?	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor
41	Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?	Rasio Panjang Jalan Kondisi Baik Dibanding Total Panjang Jalan
42	Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak?	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
43	Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?	Persentase Koefisien Ruang Terbuka Hijau (RTH)
44	Berapa rasio elektrifikasi?	Rasio Elektrifikasi
45	Berapa besar pertumbuhan ekonomi?	Pertumbuhan Ekonomi
46	Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah?	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
47	Berapa persentase penurunan/peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya
48	Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan APBD terhadap PDRB-ADHB dari Tahun Sebelumnya

No.	Indikator	Kebutuhan Data
49	Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?	Nilai PDRB Per kapita ADHB
50	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data Terakhir?	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
51	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data Terakhir?	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional untuk Penanaman Modal Asing (PMA)
52	Berapa Persentase peningkatan/penurunan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan UMKM terhadap UKM
53	Berapa Persentase Angka Kemiskinan dari tahun terakhir?	Persentase Angka Kemiskinan
54	Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP)?	Nilai Tukar Petani
55	Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun terakhir?	Indeks Ketahanan Pangan
56	Berapa Persentase balita gizi buruk tahun terakhir?	Persentase Balita Gizi Buruk
57	Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting tahun terakhir?	Persentase Jumlah Balita Stunting
58	Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?	Angka Kematian Bayi/ Balita per 1000 Kelahiran Hidup
59	Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir?	Persentase Angka Kesakitan/ Morbiditas
60	Berapa nilai angka harapan hidup tahun terakhir?	Angka Harapan Hidup Tahun Terakhir
61	Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?	Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk
62	Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?	Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
63	Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk tahun terakhir?	Rasio Dokter dan Medis Per 100.000 Penduduk
64	Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?	Angka Harapan Lama Sekolah
65	Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?	Rata-Rata Lama Sekolah
66	Berapa Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi?	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
67	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan Diploma I/ II/ III
68	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan D4/ S1
69	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Penduduk Berpendidikan S2
70	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan S3
71	Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa Sekolah Menengah kejuruan?	Angka Partisipasi Kasar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
72	Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?	Kenaikan Jumlah Program Latihan BLK 2 Tahun Terakhir
73	Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No.	Indikator	Kebutuhan Data
74	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?	Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Produk
75	Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)	Pola dan Karakteristik Kemitraan Antar Perusahaan (Kecil, Menengah dan Besar)
76	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif?	Persentase Kelembagaan Gapoktan yang Aktif
77	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?	Persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar yang Aktif
78	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?	Persentase Kelembagaan Pelaku UMKM yang Aktif
79	Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	Rasio Rumah Sakit Umum per 100.000 Penduduk
80	Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	Kontribusi Retribusi Daerah dalam PAD
81	Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?	Regulasi Pemerintah Daerah yang Mendorong Efisiensi Pasar dan Menekan Laju Inflasi Daerah
82	Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?	Tingkat Ketimpangan Ekonomi (Indeks Gini)
83	Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)?	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
84	Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
85	Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?	Indeks Pembangunan Gender
86	Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Terdidik Terhadap Total Angkatan Kerja
87	Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?	Persentase Pekerja Penuh Waktu dalam Seminggu
88	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tenaga Kerja Terampil
89	Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?	Jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha
90	Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?	Persentase Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha
91	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM
92	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

No.	Indikator	Kebutuhan Data
93	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?	Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro Kepada Petani/ Nelayan
94	Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?	Ketersediaan Modal Ventura Bagi Struktur Permodalan Koperasi dan UKM
95	Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)	Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas
96	Bagaimana pertumbuhan nilai ekspor?	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor
97	Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah Provinsi (triliun rupiah)?	Persentase Nilai Neraca Volume Perdagangan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah dengan metode survei. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Desain penelitian survei yang dipergunakan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan dan penerapan teknologi dalam praktek bisnis di Kota Surakarta.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dinas dan lembaga, serta stakeholder yang relevan dengan pengukuran indeks daya saing daerah di Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

C. Alat Analisis

Kajian ini menggunakan alat analisis sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Mishra et al., 2019).

2. Analisis Pemetaan Daya Saing Daerah

Mengukur tingkat daya saing daerah berdasarkan komponen daya saing daerah tahun 2023 diukur dengan 4 Aspek, 12 Pilar. Dari keempat aspek dan duabelas pilar daya saing daerah tersebut didetailkan lagi menjadi 23 dimensi dan 97 indikator yang dapat diisi dengan data sesuai kondisi daerah masing-masing untuk kemudian dapat dihitung untuk menghasilkan angka indeks daya saing daerah. Semakin tinggi angka indeks daya saing suatu daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang semakin tinggi pula (Rusnita et al., 2022).

3. Analisis Tahapan Pembangunan dan Daya Saing (*Stages of Development and Competitiveness*)

Klasifikasi berdasarkan tingkat pembangunan ekonomi didasarkan pada tahapan yang ditetapkan oleh *World Economic Forum* (WEF) yang meliputi:

1) *Factor-driven Economy*

Ekonomi yang digerakkan oleh faktor adalah yang paling tidak berkembang. Mereka didominasi oleh pertanian subsisten dan bisnis ekstraksi, dengan sangat bergantung pada tenaga kerja (tidak terampil) dan sumber daya alam;

2) *Efficiency-driven Economy*

Perekonomian yang digerakkan oleh efisiensi semakin kompetitif, dengan proses produksi yang lebih efisien dan peningkatan kualitas produk;

3) *Innovation-driven Economy*

Ekonomi yang digerakkan oleh inovasi adalah yang paling berkembang. Pada fase ini, bisnis lebih padat pengetahuan, dan sektor jasa berkembang.

4. *Benchmarking*

Benchmarking adalah salah satu teknik analisis yang secara luas digunakan untuk mencapai suatu proses terbaik dalam menghasilkan suatu layanan / produk yang sesuai dengan dengan kebutuhan dan harapan stakeholder (suatu kelompok) dengan cara melihat produk / layanan lain. Pelaksanaan Benchmarking dilakukan melalui tahapan – tahapan berikut:

4) Tahap 1 – Tinjauan Ulang

- a. Identifikasi daya saing yang dimiliki oleh Kota Surakarta
- b. Identifikasi daerah lain yang terbaik berdasarkan indikator/ dimensi/ pilar/ aspek
- c. Proses pengambilan data baik melalui kunjungan lapangan, atau data yang telah ada dari BRIN

5) Tahap 2 – Analisis (identifikasi)

- a. Analisis faktor-faktor yang membuat indikator/ dimensi/ pilar/ aspek unggul
- b. Analisis tingkat kesesuaian untuk diterapkan pada Kota Surakarta
- c. Analisis risiko yang timbul dari proses pengadopsian metode oleh daerah lain

6) Tahap 3 – Perencanaan

- a. Menentukan target capaian per indikator/ dimensi/ pilar aspek
- b. Menentukan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target

7) Tahap 4 – Implementasi

- a. Implementasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan
- b. Mencari cara-cara pengembangan berkelanjutan yang sesuai dengan konteks Kota Surakarta

D. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Tahap Persiapan adalah tahapan dalam rangka penyusunan TOR/kerangka acuan kerja, dan penetapan pekerjaan
2. Tahapan Penyusunan laporan pendahuluan, yaitu kegiatan perumusan permasalahan dan kondisi umum wilayah, dan metode pelaksanaan pekerjaan
3. Tahapan penyusunan laporan antara, yaitu kegiatan pengumpulan data, Pemilihan data, Pengesahan data, Pengolahan data, Analisis terhadap hasil pengolahan data serta penyusunan hasil analisis dalam laporan kajian evaluasi
4. Tahapan *benchmarking*, yaitu melakukan perbandingan dengan daerah/ wilayah lain dengan masing-masing aspek yang lebih unggul untuk dijadikan sebagai referensi
5. Tahapan penyusunan Draft Laporan Akhir, yaitu pembahasan draft laporan akhir sebelum menjadi Buku Laporan akhir
6. Tahap penyusunan Laporan Akhir, yaitu Kajian Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kota Surakarta

E. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Pelaksanaan kegiatan belanja Konsultasi Penyusunan Kajian Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Surakarta dilaksanakan dan diselesaikan selama 58 hari (Lima puluh delapan) hari kerja atau (tiga) bulan.

F. Keluaran/ Output

Keluaran atau *output* yang diharapkan dari hasil kegiatan penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta ini adalah dokumen yang memuat:

1. Laporan pengukuran Kajian Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2023;
2. Proyeksi Skor Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2024; dan

3. Rekomendasi kebijakan dan *policy brief* terkait hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022.

G. Sistematika Pelaporan

Jenis laporan yang dihasilkan dari Kegiatan Kajian Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) yaitu:

1. Laporan Pendahuluan

Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Pemetaan Daya Saing Daerah, maka laporan pendahuluan yang disusun harus mampu memberikan gambaran yang jelas kepada pemberi pekerjaan berkaitan dengan konsep dan metode pelaksanaan dan penanganan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pemberi pekerjaan. Secara garis besar laporan pendahuluan minimal berisi: (1) Gambaran tentang pekerjaan; (2) Metodologi yang dipakai; (3) Tenaga Ahli yang dipakai; dan (4) *Time Schedule* Pekerjaan. Draft Laporan pendahuluan untuk Pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah 25 (dua puluh lima) eksemplar. Laporan pendahuluan dicetak sebanyak 5 buku ukuran A4, diserahkan setelah dilaksanakan pembahasan draf laporan pendahuluan.

2. Laporan Antara

Laporan antara merupakan hasil kegiatan pengumpulan data, Pemilihan data, Pengesahan data, Pengolahan data, Analisis terhadap hasil pengolahan data serta penyusunan hasil analisis dalam laporan kajian Evaluasi. Draft Laporan antara untuk Pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah 25 (dua puluh lima) eksemplar. Laporan antara dicetak sebanyak 5 buku ukuran A4, diserahkan setelah dilaksanakan pembahasan draf laporan antara.

3. Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan hasil Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Pemetaan Daya Saing Daerah yang mencakup keseluruhan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Draft Laporan akhir untuk Pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah 25 (dua puluh lima) eksemplar. Laporan Akhir dicetak sebanyak 10 buku ukuran A4 dan *Soft Copy*

dalam bentuk CD (*Compact Disk*) sebanyak 5 keping, *executive summary* sebanyak 5 buku diserahkan setelah dilaksanakan pembahasan draf laporan akhir.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

A. Keadaan Terkini

1. Pemetaan Posisi Peran dan Daya Saing Daerah dalam Sistem Ekonomi Regional

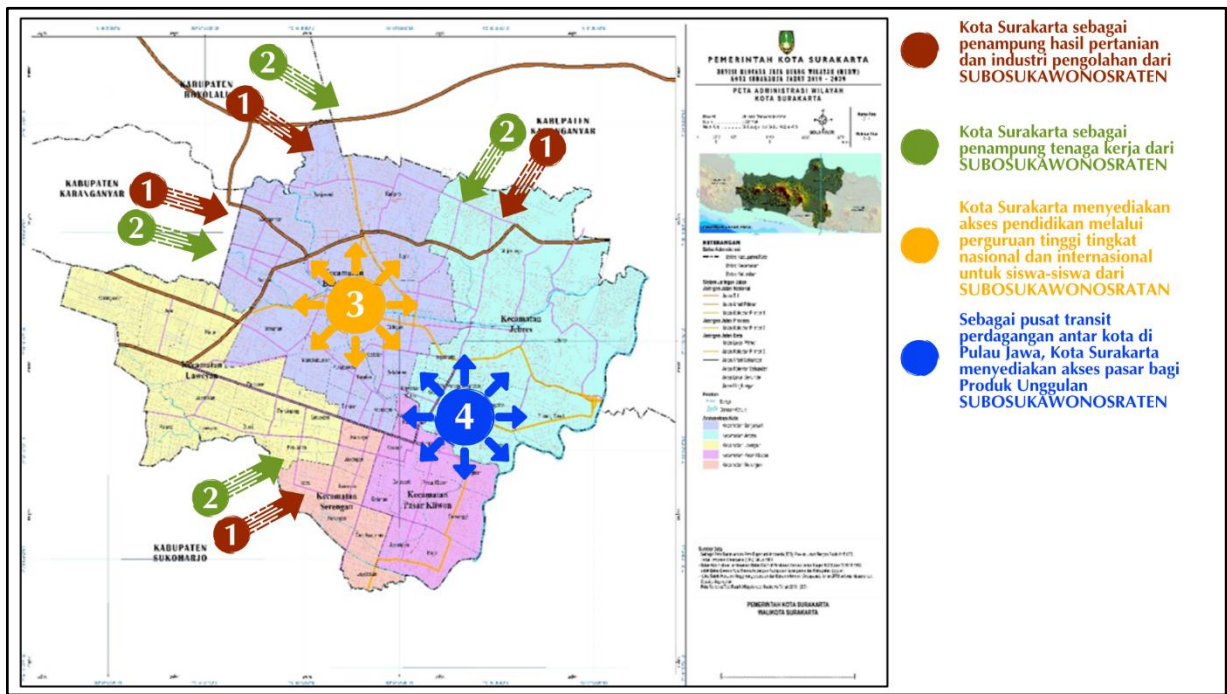
Kota Surakarta terletak antara 110°45'15" – 110°45'35 Bujur Timur dan 7°36'00" – 7°56'00" Lintang Selatan. Wilayah ini termasuk dataran rendah dengan ketinggian $\pm$ 92 meter dari permukaan laut dan dilalui oleh sungai Pepe, Jenes, Anyar dan Bengawan Solo. Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT). Perbatasan administrasi wilayah Kota Surakarta, menurut RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

Batas Utara	: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
Batas Selatan	: Kabupaten Sukoharjo
Batas Timur	: Kabupaten Karanganyar
Batas Barat	: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Surakarta, sebagai pusat perdagangan dan perhotelan, memiliki korelasi yang erat dengan Subosukawonosraten dalam sektor ekonomi. Dengan menjadi pusat singgah lintas provinsi di pulau Jawa, Surakarta menjadi pintu gerbang bagi barang-barang yang masuk dan keluar dari wilayah ini. Kabupaten-kabupaten Subosukawonosraten, dengan kekuatan mereka dalam pertanian dan industri pengolahan, menyediakan pasokan bahan baku yang penting bagi bisnis dan industri di Surakarta. Dengan demikian, ketergantungan Surakarta pada bahan baku dari Subosukawonosraten menciptakan keterikatan ekonomi yang saling menguntungkan antara kota dan kabupaten-kabupaten sekitarnya.

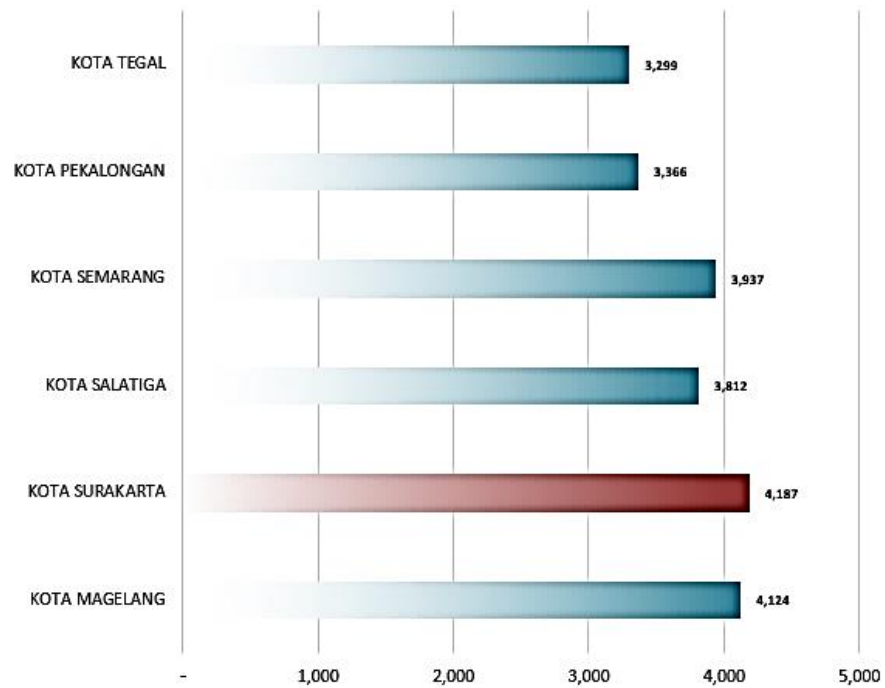
Selain itu, sektor pariwisata berbasis budaya di Surakarta juga memberikan manfaat bagi Subosukawonosraten. Kunjungan wisatawan ke Kota Surakarta yang terutama tertarik dengan warisan budaya, seperti Keraton Surakarta dan seni tradisional Jawa, menciptakan permintaan yang tinggi terhadap produk-produk kerajinan lokal di kabupaten-kabupaten sekitarnya. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat Subosukawonosraten untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk khas mereka kepada wisatawan yang datang ke Surakarta. Sebagai hasilnya, sektor kerajinan dan industri pengolahan di Subosukawonosraten mendapatkan dukungan dari sektor pariwisata di Surakarta.

Di sisi lain, Subosukawonosraten, dengan kekuatan pertanian mereka, menyediakan pasokan makanan dan produk pertanian yang penting bagi keberlanjutan Kota Surakarta. Kabupaten-kabupaten di sekitarnya, seperti Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten, menjadi sumber utama beras, sayuran, buah-buahan, dan produk pertanian lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor perhotelan di Surakarta. Kerjasama dalam hal penyediaan makanan antara Surakarta dan Subosukawonosraten sangat penting untuk menjaga ketersediaan dan keberlanjutan pasokan pangan di kota tersebut.

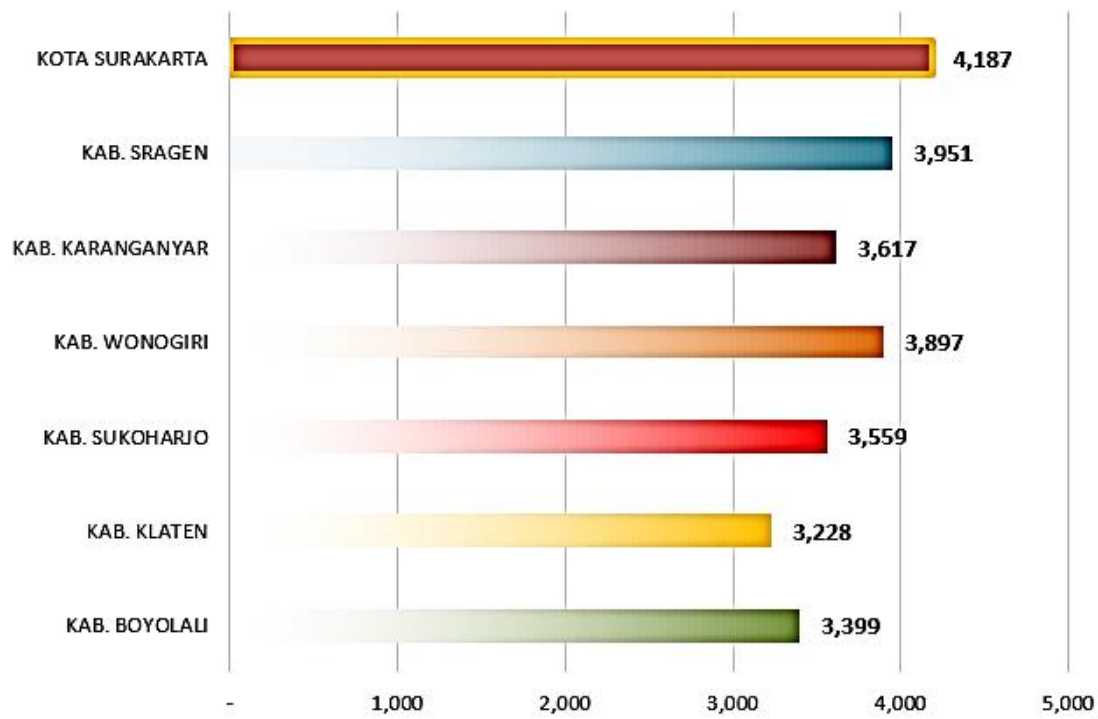


Gambar 4.1 Peran Kota Surakarta terhadap Wilayah Subosukawonosraten

Pada hasil pemetaan terbaru tahun 2022, Nilai Daya Saing Daerah Kota Surakarta merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 4,187. Nilai ini berada di atas Kota Magelang yaitu 4,124 dan Kabupaten Sragen yaitu 3,951 serta berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dengan perbedaan nilai yang tidak signifikan yaitu 4,128. Kondisi ini merepresentasikan bahwa Daya Saing Kota Surakarta sudah cukup relevan dan mencerminkan Kondisi Daya Saing Provinsi Jawa Tengah. Kondisi Ini berlaku juga apabila dibandingkan dengan Kabupaten Lain di wilayah yang sama meliputi Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.



Gambar 4.2 Daya Saing Kota Surakarta dibandingkan dengan Kota di Jawa Tengah Tahun 2022



Gambar 4.3 Daya Saing Surakarta dibanding Wilayah Lain di Subosukawonosraten Tahun 2022

Di Wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten), Kota Surakarta adalah satu-satunya daerah yang memperoleh nilai lebih dari 4,000. Hanya Kabupaten Sragen yang mendekati nilai 4,000 yaitu dengan nilai 3,951, dan Kabupaten Wonogiri 3,897. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Surakarta merupakan kota dengan daya saing paling baik, dan bisa dijadikan sebagai *benchmarking* bagi daerah lain untuk meningkatkan daya saing mereka.

2. Pemetaan Aspek Capaian Pembangunan dalam Konteks Tahapan *Faktor-Driven*, *Efficiency-Driven*, dan *Innovation Driven*

Dalam mengejar pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, baik negara maupun regional provinsi, kota, dan kabupaten memulai perjalanan transformatif yang ditandai dengan tahapan pembangunan yang berbeda. Tahapan ini merangkum serangkaian proses penting yang membentuk lintasan kemajuan mereka. Sepanjang sejarah, tiga tahap utama telah muncul sebagai pilar fundamental bagi negara dan wilayah: pembangunan yang digerakkan oleh faktor (*factor-driven*), digerakkan oleh efisiensi (*efficiency-driven*), dan digerakkan oleh inovasi (*innovation-driven*). Tahapan ini mewakili tonggak penting, masing-masing mencakup tantangan, peluang, dan strategi yang unik. Dengan memahami dan mengarahkan proses pembangunan ini secara efektif, negara dan wilayah regional dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia, mengoptimalkan efisiensi, dan membuka potensi transformatif inovasi, mendorong mereka menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif .

Pada tahap pembangunan yang digerakkan oleh faktor (*factor-driven*), negara-negara maupun daerah administratif di bawahnya bergantung pada faktor produksi yang melimpah, seperti sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan bahan mentah. Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh upaya eksploitasi sumber daya inti dan industri dasar. Pada tahap ini, negara atau daerah biasanya memiliki tingkat teknologi dan inovasi yang masih rendah atau sederhana sekali, dan daya saing mereka didasarkan pada ketersediaan faktor alam dan tenaga kerja yang murah. Dalam tahap ini, investasi dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan pendidikan dianggap hal yang paling penting untuk mendukung evolusi di masa depan.

Pada tahap yang digerakkan oleh efisiensi (*efficiency-driven*), negara-negara dan daerah mulai fokus pada peningkatan produktivitas dan upaya efisiensi. Tahap ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada, namun mulai

ditingkatkan melalui daya saing industri. Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan manufaktur dan perkembangan industri yang lebih canggih. Negara-negara dan daerah-daerah berinvestasi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan teknologi dan infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan manajerial. Wilayah yang berada pada tahapan pertumbuhan yang berbasis pada faktor efisiensi, seringkali juga dapat terlibat dalam perdagangan internasional dan menarik investasi asing langsung untuk memperluas basis ekspor wilayah tersebut.

Tahap pertumbuhan yang dikendalikan oleh inovasi (*innovation driven*) merupakan tingkat tertinggi pembangunan ekonomi. Negara-negara dan daerah-daerah pada tahap ini memprioritaskan inovasi, teknologi, dan industri berbasis pengetahuan serta intelektualitas. Mereka banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan sistem inovasi untuk mendorong kreativitas dan menciptakan produk, layanan, dan proses baru. Penekanannya bergeser dari daya saing biaya ke penciptaan nilai dan diferensiasi. Ekonomi yang digerakkan oleh inovasi berfokus pada pengembangan industri teknologi tinggi, mendorong kewirausahaan, dan memelihara ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas termasuk melalui upaya perlindungan-perlindungan atas kekayaan intelektualitas.

Dalam konteks Kota Surakarta, meskipun sudah menjadi Kota dengan karakteristik urban, Kota Surakarta masih tetap ditopang oleh perekonomian yang bergantung kepada Sumber Daya. Pada tahap *factor-driven*, perkembangan ekonomi Kota Surakarta dapat berpusat pada industri-industri manufaktur yang memanfaatkan tenaga kerja yang dididik dengan kemampuan dasar melalui balai pelatihan dan lembaga vokasi lainnya, serta ketersediaan bahan baku yang diperoleh dari wilayah-wilayah penyangga sekitarnya. Tahap ini dapat mencakup sektor-sektor seperti tekstil, pengolahan makanan, atau kerajinan tangan tradisional, yang relatif padat karya dan mengandalkan sumber daya alam di wilayah sekitar Subosukawonosratan.

Pada tahap pembangunan dan pertumbuhan yang digerakkan oleh efisiensi (*efficiency-driven*), tahapan ini masih belum juga hilang dan masih dijalankan oleh ekosistem Kota Surakarta. Kota Surakarta dalam tahapan ini masih terus berupaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dan sektornya. Tahapan ini melibatkan adopsi teknologi modern, penerapan praktik terbaik, dan peningkatan proses produksi untuk mencapai hasil yang lebih tinggi dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Dukungan-dukungan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan

lembaga terkait lain berupa bantuan mesin dan pelatihan pengoperasian mesin menandakan tahap *efficiency-driven* yang masih tetap dikembangkan di Kota Surakarta.

Meskipun kegiatan-kegiatan yang menandakan bahwa Kota Surakarta masih tetap bertumbuh dengan dukungan faktor maupun efisiensi, Kota Surakarta secara simultan juga sudah mulai menapaki tahapan pembangunan yang berbasis pada dukungan inovasi (*innovation-driven*). Kota Surakarta mendorong kewirausahaan dan mendukung pendirian dan pertumbuhan startup. Tahap *innovation-driven* melibatkan penyediaan akses ke pendanaan (*crowd-funding, lending model, dsb.*), program fasilitasi dan bimbingan, peluang jaringan, dan menciptakan kerangka peraturan yang memfasilitasi kegiatan kewirausahaan berbasis inovasi dan intelektualitas. Upaya surakarta dalam menumbuhkan *startup* memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan menarik investasi. Kota Surakarta mendorong kolaborasi antara industri, lembaga penelitian, dan akademisi untuk terus menumbuhkan inovasi dan berbagi pengetahuan (*knowledge-sharing*) secara luas namun juga tetap memperhatikan asas perlindungan orisinalitas. Tahapan pertumbuhan yang didorong oleh inovasi ini termasuk inisiatif seperti kemitraan publik-swasta, proyek penelitian bersama, dan kelompok industri yang memfasilitasi kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang berbeda. Melalui universitas-universitas berskala nasional maupun internasional seperti Universitas Negeri Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Inkubator Bisnis dan Kawasan Teknologi *Solo Technopark*, serta komunitas-komunitas kreatif, Kota Surakarta sudah mulai mengandalkan produk-produk unggulan yang merupakan hasil dari karya intelektual dan inovasi berkelanjutan, contohnya hadirnya *Solocon Valley*, dan event-event berbasis kreatifitas seperti *Solo International Performing Arts*.



Gambar 4.4 Aspek Capaian Pembangunan Kota Surakarta

3. Rumusan Peluang, Kendala dan Inventarisasi Urgensi

Kota Surakarta sudah lama dikenal sebagai jalur perdagangan dan transit perjalanan lintas kota di pulau Jawa, sehingga potensi sektor perdagangan, jasa real estate, hotel dan restoran tergali secara lebih baik sebagai sektor unggulan bersama dengan kepariwisataan berbasis kebudayaan. Letak geografis Kota Surakarta sebagai kota transit yang dilalui lalu lintas Jakarta-Surabaya sangat berpengaruh dalam perkembangan perdagangan termasuk produk-produk unggulan daerah bukan hanya di Kota Surakarta saja namun juga wilayah Subosukawonosraten. Produk yang diperdagangkan erat kaitannya dengan sektor industri dan pengolahan. Perdagangan yang berorientasi ekspor dilakukan oleh perusahaan dengan skala produksi yang besar. Produk yang diperdagangkan antara lain produk tekstil dan hasil kerajinan. Sedangkan perkembangan sub sektor hotel dan restoran merupakan faktor pendukung bagi perkembangan sektor perdagangan dan wisata. Banyak orang yang datang ke kota Surakarta dengan maksud keperluan bisnis ataupun hanya sekedar berlibur, sehingga fungsi hotel dan restoran sangat mendukung dan diharapkan para pengunjung.

Selain itu Kota Surakarta kuat dalam hal kriya atau barang kerajinan tangan berbasis folk art (Astuti dkk., 2017). Kementerian Perindustrian melakukan pendataan komprehensif terhadap sampel 150 pengrajin mebel Kota Surakarta yang mampu menembus pasar internasional, dan ditunjuk sebagai gerbang utama ekspor mebel dan kriya oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Realisasi nilai ekspor mencapai 1.620 juta dolar AS

dengan kontribusi besar adalah dari kriya, kemudian disusul oleh mebel kayu, plastik, dan mebel rotan. Tingginya kemampuan ekspor dari subsektor kriya ini disokong oleh beberapa produsen-produsen kriya seperti Rumah Kriya Banjarsari yang bergerak di bidang kriya kayu olahan, Pusat Keris dan Cenderamata, Kerajinan Wayang Kulit. Kriya lain meliputi berbagai kerajinan berbahan kayu, logam, tekstil, kulit, kaca, dan keramik.

Berdasarkan analisis PDSD Kota Surakarta dari rentang tahun 2018-2022, kendala yang dihadapi oleh Kota Surakarta adalah peningkatan kelas pada level usaha mikro kecil dan menengah, yang tidak sejalan dengan munculnya UMKM-UMKM baru sehingga hal ini menjadikan pertumbuhan industri kecil dan menengah kurang optimal. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada UMKM yang tidak pernah mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain kendala utama terkait dengan pertumbuhan umkm dan kredit yang disalurkan kepada UMKM, kendala lain adalah terbatasnya lahan dan karakteristik urban Kota Surakarta. Kota Surakarta juga masih menghadapi permasalahan tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan daerah sama seperti kebanyakan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2022 angka kemiskinan masih mencapai 9% dengan tingkat ketimpangan ekonomi sebesar lebih dari 0,35. Terkait dengan kemampuan jual-beli, meskipun merupakan basis perdagangan lokal, melalui pusat grosir Pasar Klewer maupun Benteng Trade Centar, Kota Surakarta masih belum kuat dalam hal perdagangan antar daerah karena nilai beli Kota ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai penjualannya.

4. Pemetaan Komponen Pembentuk Andalan

Kota Surakarta, juga dikenal sebagai Solo, adalah kota yang hidup dan kaya akan budaya yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Terkenal karena signifikansi sejarah dan seni tradisional Jawa, Surakarta telah menjadi tujuan wisata utama. Untuk memahami esensi kota ini, penting untuk memetakan dan mengeksplorasi komponen pembentuk andalannya. Komponen tersebut mencakup berbagai aspek yang berkontribusi terhadap keunikan identitas dan pertumbuhan ekonomi Surakarta.

Salah satu komponen utama pembentuk andalan Kota Surakarta adalah warisan budayanya. Kota Surakarta sangat dibanggakan Indonesia dan dunia dalam melestarikan tradisi Jawa yang khas dan beragam, melalui wayang kulit, musik gamelan, seni batik, dan tarian atau seni pertunjukan tradisional. Warisan budaya Surakarta tidak hanya menarik

wisatawan tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi seniman dan pengrajin lokal. Komitmen kota Surakarta untuk melestarikan dan mempromosikan aset budayanya telah menjadikannya pusat seni dan kerajinan tradisional yang terekognisi secara global.

Komponen penting lainnya dari identitas Surakarta adalah eksistensi bangunan bersejarah dan arsitekturnya. Kota Surakarta memiliki beberapa istana yang megah namun tidak meninggalkan aksen tradisional, termasuk Keraton Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran, yang merupakan bukti warisan kebudayaan di masa lampau yang masih bertahan. Keajaiban arsitektur ini memamerkan perpaduan pengaruh Jawa dan Eropa, yang mencerminkan kekayaan sejarah kota dan pertukaran budaya. Landmark bersejarah Surakarta tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata tetapi juga berkontribusi pada penguatan branding dan ciri khas Kota Surakarta dibandingkan dengan kota-kota budaya lain yang ada di Indonesia.

Vitalitas ekonomi Surakarta didorong oleh jiwa kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kota ini terkenal dengan pasar tradisionalnya yang unik dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional di kota lain. Pasar tradisional yang diakui antara lain seperti Pasar Klewer dan Pasar Gede, dan Pasar Barang Antik Triwindu yang merupakan tempat pedagang lokal menjual berbagai macam produk, termasuk batik, kerajinan tangan, dan hidangan lokal. Pasar-pasar ini berfungsi sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Surakarta, menyediakan lapangan kerja dan menumbuhkan rasa kebersamaan di bawah payung budaya lokal. Budaya kewirausahaan, produk kreatif, dan keragaman UMKM berkontribusi pada ketahanan dan keberlanjutan ekonomi kota.

Terakhir namun tidak kalah penting, komponen pembentuk andalan Kota Surakarta antara lain adalah komitmennya terhadap pembangunan kota kreatif dan infrastruktur pariwisata. Kota Surakarta telah melakukan investasi yang signifikan dalam meningkatkan jaringan transportasinya, memperluas pilihan akomodasi, dan meningkatkan pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Dengan berkembangnya pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran tradisional-modern, Surakarta menawarkan perpaduan sempurna antara budaya lokal dan modernitas estetis. Fokus pada pengembangan perkotaan dan infrastruktur pariwisata ini tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor pariwisata tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Perekonomian Kota Surakarta dibentuk oleh kombinasi aspek-aspek kunci yang berkontribusi pada semangat dan pertumbuhannya. Warisan budaya kota ini, meliputi seni tradisional, kerajinan tangan, dan pertunjukan, berfungsi sebagai dasar identitasnya dan

menarik wisatawan dan seniman lokal. Bangunan bersejarah Surakarta, termasuk istana megah, berdiri sebagai pengingat kebanggaan akan warisan kerajaan dan keunggulan arsitekturnya. Semangat kewirausahaan dan berkembangnya usaha kecil dan menengah (UKM) di pasar tradisional mendorong ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja dan memupuk rasa kebersamaan. Selain itu, komitmen Surakarta untuk pengembangan kota dan infrastruktur pariwisata meningkatkan pengunjung secara keseluruhan.

Dengan memetakan komponen pembentuk andalan Kota Surakarta yang meliputi warisan budaya, bangunan bersejarah, kewirausahaan kreatif dan UMKM, serta pembangunan kota kreatif dan infrastruktur pariwisata, menjadi jelas bahwa Kota Surakarta adalah tujuan yang dinamis dan multifaset (beraneka ragam). Komponen-komponen tersebut terjalin untuk menciptakan kota yang dengan tegas tetap merangkul masa lalunya, namun sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkemajuan, sehingga mampu memberikan pengalaman yang menawan bagi penduduk lokal, pengunjung, hingga calon investor.



Gambar 4.5 Komponen Pembentuk Andalan Kota Surakarta

B. Arah Kebijakan Pembangunan

1. Formulasi Kebijakan melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap

kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan terkait dengan isu strategis pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah:

1) Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal

Isu strategis berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan adalah:

- a. Pemetaan sumber daya aparatur berbasis sistem merit
- b. Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah
- c. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat
- d. Optimalisasi layanan fungsi DPRD
- e. Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektornik
- f. Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- g. Penguatan kerja sama regiona, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan kelompok masyarakat
- h. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik
- i. Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran, dan pemanfaatan inovasi daerah
- j. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi

2) Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter, unggul dan tangguh

Isu strategi ini terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari banyak aspek. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, pengintegrasian falsafah budaya Jawa ke dalam kehidupan bermasyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak,

penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara menyeluruh adil dan merata. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga
- c. Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing
- d. Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja
- e. Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak
- f. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- g. Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan
- h. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya

3) Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan

Perkembangan ekonomi dalam era industri 4.0 dibutuhkan sebagai salah satu perkembangan industri yang harus diikuti. Seiring dengan perkembangan era industri 4.0, Kota Surakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan aspek perkembangan sejarah kuno dan kini yang telah terjadi, untuk melihat kondisi nanti perkembangan dan daya saing ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan era industri 4.0 yang terjadi mengakibatkan perkembangan dunia digital/cyber berlangsung secara cepat. Penguatan daya saing ekonomi dalam era industri 4.0 ini juga diharapkan mampu mengisi ruang-ruang lahan yang direncanakan dalam rencana pola ruang terutama dalam sektor industri dan perdagangan jasa. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, Wiskulja dan Ekonomi Digital berbasis konsep Eco Cultural City
- b. Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan Smart City
- c. Penguatan budaya cinta kota dan produk kota bagi generasi muda sebagai duta daya saing ekspor

- d. Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan
- e. Peningkatan daya tarik investasi
- f. Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi
- g. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

4) Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh

Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Pembangunan infrastruktur kota diamanatkan kota yang berkarakter adalah kota yang memiliki akar budaya lokal. Kota yang memperhatikan budaya-budaya lokal, memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan budaya lokalnya. Perincian isu infrastruktur pendukung Kota Budaya adalah sebagai berikut:

- a. Isu infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya
- b. Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi
- c. Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat
- d. Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim

5) Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan kota yang kondusif

Perincian isu pemenuhan hak dasar dan mempertahankan kekondusifan daerah terjabarkan sebagai berikut:

- a. Isu perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
- b. Penguatan pencegahan risiko gangguan daerah dan manajemen risiko bencana

2. Terobosan Strategi melalui Perencanaan Berbasis Penelitian, dan Pengembangan Berbasis Perencanaan

Berdasar pada RPJMD Tahun 2021-2026, tahun 2023 merupakan tahun perencanaan ketiga untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta lima tahun ke depan. Melalui arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yang ditujukan untuk “Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal”, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada:

- 1. Peningkatan jumlah startup digital yang terus dibina untuk maju ke tahap unicorn;
- 2. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan melanjutkan jaminan sosial;

3. Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE (*meeting, incentive, conference, dan exhibition*), Wiskulja (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya, olahraga, kesehatan dan ekonomi digital berbasis konsep *Eco Cultural City*;
4. Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, dan kompetitif;
5. Penataan organisasi tata kerja dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan perubahan regulasi yang berlaku dan perkembangan normal baru;
6. Inisiasi Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - a. Pemasaran kota melalui event budaya dan olahraga
 - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya local
 - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - e. Pengentasan Kemiskinan
 - f. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
7. Pengembangan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis teknologi informasi menuju *smart education*; dan
8. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai budaya lokal mewujudkan kota cerdas (*smart city*).

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, tingkat optimisme hasil Indeks Daya Saing Kota Surakarta ditahun 2023 akan tetap bertahan dan bisa untuk diupayakan lebih baik dari tahun 2022. Setidaknya, apabila belum mampu mencapai level perbaikan, diharapkan dapat meningkatkan jumlah nilai pada masing-masing indikator.

3. Kerangka Kebijakan Terintegrasi Pembangunan

Kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintah daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor governance dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat disarikan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
- b. Pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan resiko bisnis.
- c. Efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah.
- d. Efektivitas pemerintah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.
- e. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung daya saing daerah.

BAB V

ANALISIS DAYA SAING KOTA SURAKARTA

A. Analisis Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2023

Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Indonesia disusun mengacu pada Kuesioner Pemetaan Ekosistem Inovasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kuesioner PDSD tersusun berdasarkan 4 aspek yang terdiri dari 12 pilar, dan 23 dimensi, dan secara spesifik memuat 97 indikator yang dijadikan item pengukuran. Pada tahun 2023 Kota Surakarta telah mengumpulkan proyeksi untuk melengkapi 97 indikator dengan data dukung yang relevan, sehingga dapat diukur perkembangan tingkat daya saing pada Kota Surakarta pada tahun 2023. Dari 97 indikator yang diukur dengan skala 1 (level daya saing paling rendah) hingga skala 5 (level daya saing paling tinggi), terdapat hasil yang variatif. Meski begitu, daya saing Kota Surakarta diproyeksikan sudah didominasi oleh level 5 yaitu sebanyak 69 indikator. Sementara itu hanya terdapat 6 indikator saja yang merupakan level daya saing 1, dan 11 indikator yang merupakan level daya saing 2. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Surakarta merupakan daerah yang memiliki kecenderungan berdaya saing sangat baik. Daya saing Kota Surakarta ini didukung oleh sektor konstruksi, perdagangan, dan informasi komunikasi terhadap PDRB. Skor Daya Saing 2023 tidak mengalami perubahan signifikan apabila dibandingkan dengan skor Daya Saing 2022. Beberapa indikator yang masih berada pada level 1 pada tahun 2022 didorong untuk meningkat ke level 2 pada tahun 2023, begitu pula dengan indikator yang berada di level 4 dan 5 pada tahun 2022 diupayakan untuk terus dipertahankan pada tahun 2023, meskipun terdapat beberapa indikator yang tidak bisa diintervensi karena merupakan indikator yang menjadi kewenangan level provinsi.

Berdasarkan sebaran level, secara umum diproyeksikan peningkatan kemampuan daya Saing Surakarta dari tahun 2022 ke tahun 2023, dicerminkan oleh meningkatnya jumlah indikator yang berada di level 5. Pada tahun 2022 terdapat 66 indikator yang berada pada level 5, meningkat menjadi 69 indikator pada tahun 2023. Perubahan ini sejalan dengan upaya pengentasan indikator dari level 1 ke level 2, dimana pada tahun 2022 terdapat 10 indikator dengan level 1, diproyeksikan telah ada upaya peningkatan pada tahun 2023 hanya terdapat 6 indikator di level 1.

Tabel 5.1 Proyeksi Skor Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan Indikator Tahun 2023

No.	Indikator	Skor 2022	Skor 2023
1	Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?	5,000	5,000
2	Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri?	2,000	2,000
3	Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?	3,000	3,000
4	Berapa persentase usaha/industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?	5,000	5,000
5	Bagaimana Presentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?	1,000	2,000
6	Bagaimana presentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)	5,000	5,000
7	Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO)	5,000	5,000
8	Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar? (dalam bentuk sertifikat ISO)	5,000	5,000
9	Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?	5,000	5,000
10	Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?	5,000	5,000
11	Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?	5,000	5,000
12	Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?	5,000	5,000
13	Berapa jumlah Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	5,000	5,000
14	Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?	4,000	5,000
15	Berapa jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	5,000	5,000
16	Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun terakhir?	5,000	5,000
17	Berapa jumlah Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?	5,000	5,000
18	Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis,	5,000	5,000

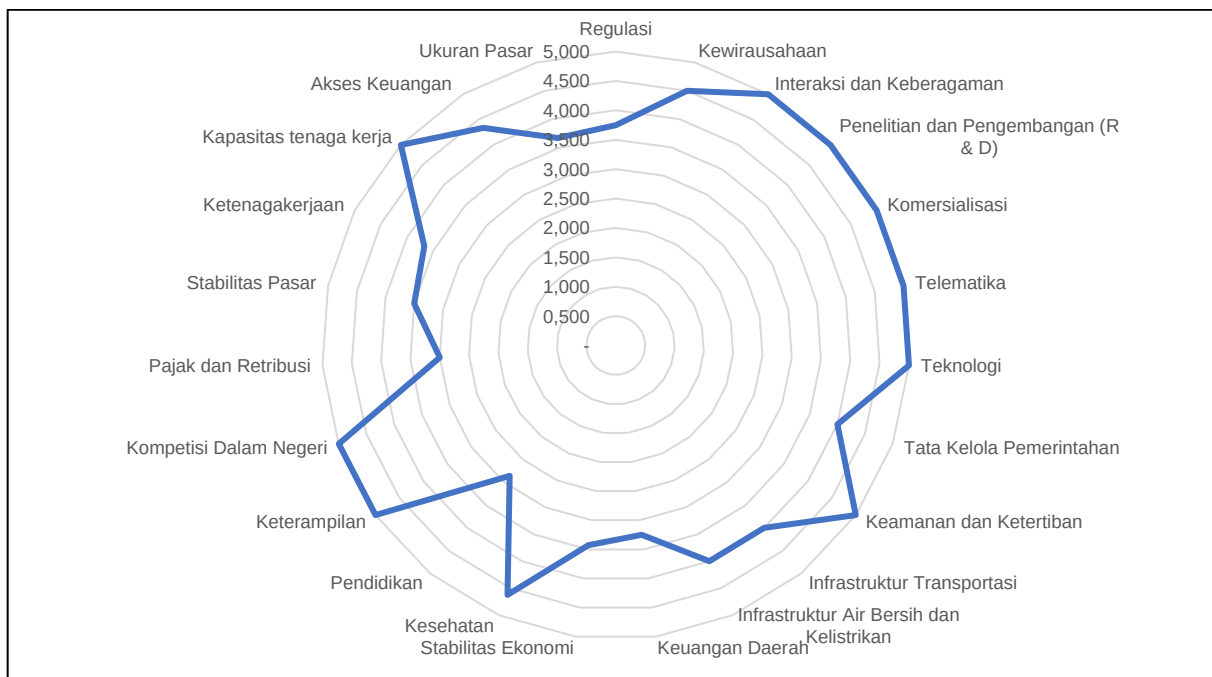
No.	Indikator	Skor 2022	Skor 2023
	design Industri, dll) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?		
19	Berapa Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	5,000	5,000
20	Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?	5,000	5,000
21	Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?	5,000	5,000
22	Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian dari perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?	4,000	5,000
23	Berapa persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?	5,000	5,000
24	Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)	5,000	5,000
25	Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?	5,000	5,000
26	Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?	5,000	5,000
27	Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?	5,000	5,000
28	Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?	5,000	5,000
29	Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?	5,000	5,000
30	Berapa Proporsi rumah tangga dengan akses internet?	5,000	5,000
31	Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan?	5,000	5,000
32	Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?	5,000	5,000
33	Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	4,000	4,000
34	Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	2,000	2,000
35	Apakah hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	3,000	3,000
36	Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?	5,000	5,000
37	Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi?	5,000	5,000
38	Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)?	5,000	5,000
39	Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)?	5,000	5,000
40	Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor?	3,000	3,000
41	Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?	5,000	5,000
42	Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak?	5,000	5,000
43	Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?	2,000	2,000
44	Berapa rasio elektrifikasi?	5,000	5,000
45	Berapa besar pertumbuhan ekonomi?	4,000	4,000

No.	Indikator	Skor 2022	Skor 2023
46	Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah?	5,000	5,000
47	Berapa persentase penurunan/peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?	1,000	1,000
48	Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya?	3,000	3,000
49	Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?	4,000	4,000
50	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data Terakhir?	5,000	5,000
51	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data Terakhir?	1,000	1,000
52	Berapa Persentase peningkatan/penurunan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?	1,000	2,000
53	Berapa Persentase Angka Kemiskinan dari tahun terakhir?	2,000	2,000
54	Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP)?	5,000	5,000
55	Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun terakhir?	5,000	5,000
56	Berapa Persentase balita gizi buruk tahun terakhir?	5,000	5,000
57	Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting tahun terakhir?	5,000	5,000
58	Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?	5,000	5,000
59	Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir?	1,000	2,000
60	Berapa nilai angka harapan hidup tahun terakhir?	5,000	5,000
61	Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?	5,000	5,000
62	Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?	5,000	5,000
63	Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk tahun terakhir?	5,000	5,000
64	Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?	4,000	4,000
65	Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?	3,000	3,000
66	Berapa Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi?	1,000	1,000
67	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?	3,000	3,000
68	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk?	5,000	5,000
69	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?	2,000	2,000
70	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?	2,000	2,000
71	Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa Sekolah Menengah kejuruan?	5,000	5,000
72	Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?	5,000	5,000
73	Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?	5,000	5,000
74	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?	5,000	5,000
75	Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)	5,000	5,000

No.	Indikator	Skor 2022	Skor 2023
76	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif?	5,000	5,000
77	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?	5,000	5,000
78	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?	5,000	5,000
79	Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	1,000	1,000
80	Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	5,000	5,000
81	Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?	5,000	5,000
82	Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?	2,000	2,000
83	Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)?	5,000	5,000
84	Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)	1,000	1,000
85	Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?	5,000	5,000
86	Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?	5,000	5,000
87	Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?	5,000	5,000
88	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?	5,000	5,000
89	Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?	5,000	5,000
90	Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?	5,000	5,000
91	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	1,000	2,000
92	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	5,000	5,000
93	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?	4,000	4,000
94	Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?	4,000	5,000
95	Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)	5,000	5,000
96	Bagaimana pertumbuhan nilai ekspor?	5,000	5,000
97	Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah Provinsi (triliun rupiah)?	1,000	1,000

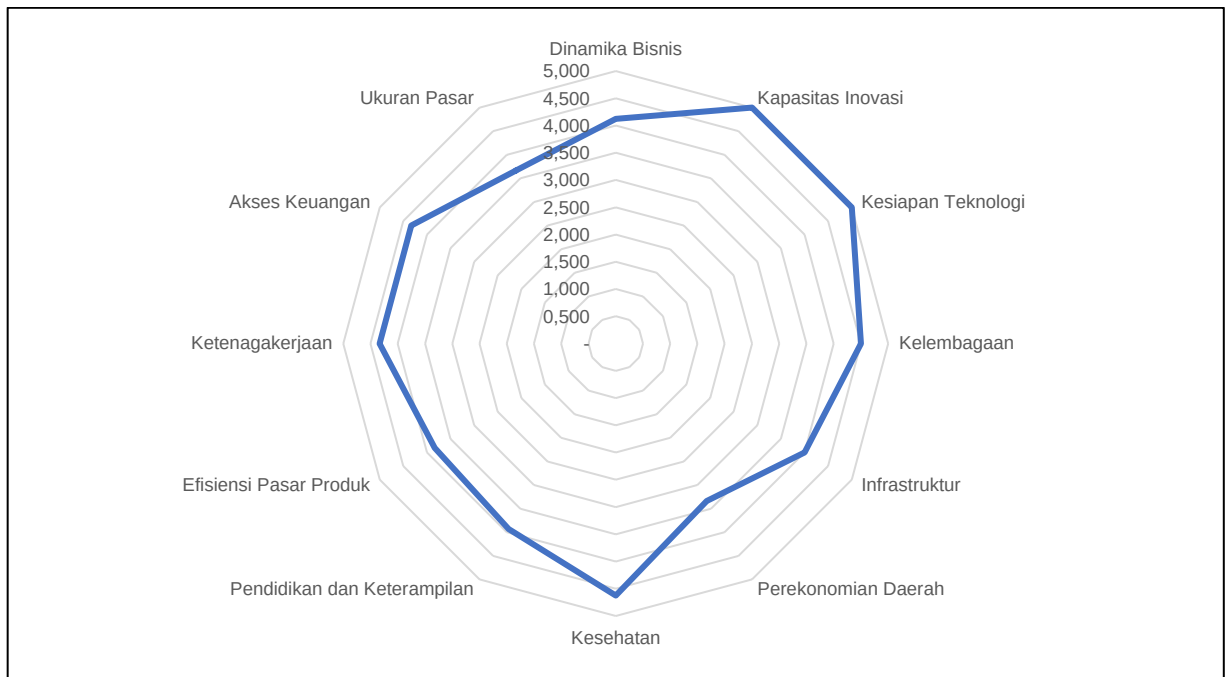
Berdasarkan dimensi, pendorong daya saing Kota Surakarta yang paling andal antara lain adalah dimensi “Interaksi dan Keberagaman”, “R&D”, “Komersialisasi”, “Telematika”, “Teknologi”, “Keamanan dan Ketertiban”, “Keterampilan”, “Kompetisi Dalam Negeri”, serta “Kapasitas Tenaga Kerja” dengan skor masing-masing dimensi sebesar 5,000/ 5,000. Sementara itu masih terdapat pula beberapa dimensi yang masih perlu untuk

terus dioptimalkan karena berada pada skor di bawah 3,000 yaitu dimensi “Pendidikan” yang masih berada pada skor 2,857. Lemahnya dimensi pendidikan ini dipengaruhi oleh persentase penduduk lulusan S1, S2, maupun S3 yang masih relatif sedikit, dimana kondisi ini juga dialami oleh hampir seluruh Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah maupun Indonesia.



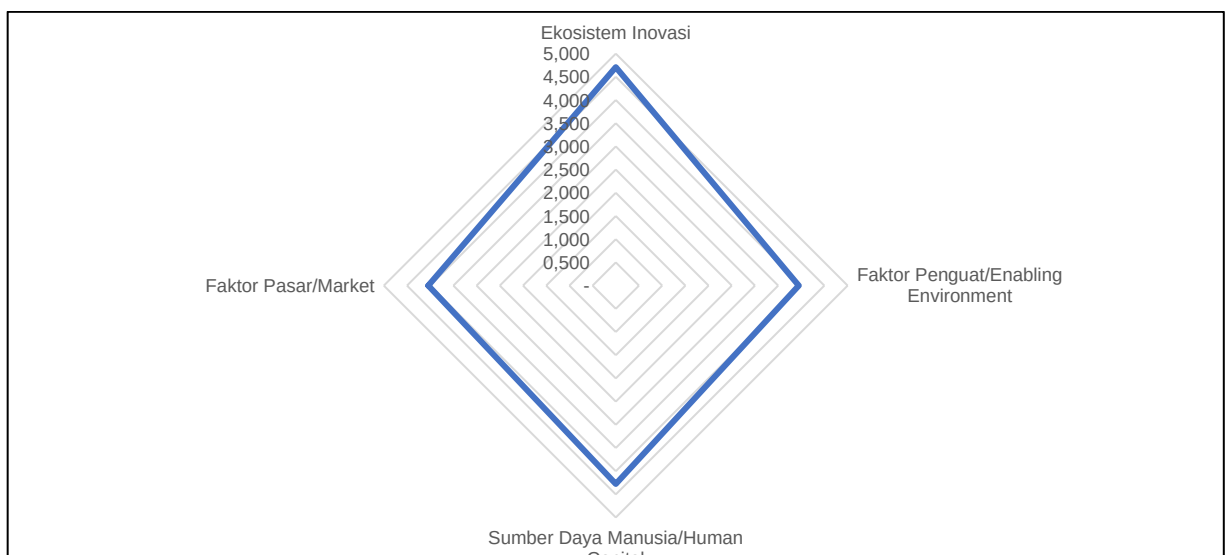
Gambar 5.1 Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2023 berdasarkan Dimensi

Berdasarkan pilar, kekuatan daya saing Kota Surakarta bertumpu pada “Kapasitas Inovasi” dan “Kesiapan Teknologi” yang berada pada skor 5,000. Kondisi ini relevan dengan paradigma pembangunan ekonomi Kota Surakarta yang sudah mulai mengutamakan *innovation-driven* melalui kuatnya kolaborasi antara universitas berskala internasional, kawasan teknologi *Solo Technopark*, serta lembaga-lembaga kelitbangan yang tersebar pada industri menengah dan besar untuk mendorong peningkatan kelas industri pada level mikro dan kecil. Meskipun tidak ada pilar yang berada pada skor di bawah 3,000, namun terdapat pilar yang masih bisa untuk terus dioptimalkan yaitu “Perekonomian Daerah” karena masih berada pada angka 3,339 atau satu-satunya pilar yang berada pada skor di bawah 3,500. Demikian juga dengan pilar “Ukuran Pasar” yang masih berada pada skor 3,667 karena kondisi ini tidak relevan dengan status Kota Surakarta yang meraih penghargaan Kota terbaik dalam kategori faktor pasar pada tahun 2022.



Gambar 5.2 Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2023 berdasarkan Pilar

Daya saing Kota Surakarta direpresentasikan juga melalui aspek “Ekosistem Inovasi” dengan skor 4,708 atau merupakan aspek terbaik, serta aspek “Faktor Penguat/ *Enabling Environment*” dengan skor 3,946 atau merupakan aspek yang terendah. Sementara itu, skor untuk aspek “Sumber Daya Manusia/ *Human Capital*” adalah 4,277 serta aspek “Faktor Pasar/ *Market*” adalah 4,042.



Gambar 5.3 Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2023 berdasarkan Aspek

Kota Surakarta telah memantapkan dirinya sebagai pusat kota yang berdaya saing tinggi dan berkembang, didorong oleh aspek, pilar, dan dimensi yang unggul. Dengan warisan budayanya yang kaya, Surakarta menampilkan perpaduan unik antara seni dan kerajinan tradisional, menarik wisatawan dari seluruh dunia. Aspek ini berfungsi sebagai landasan yang kokoh bagi daya saing kota, karena mempertahankan identitasnya yang khas dan menciptakan peluang bagi wisata budaya. Selain itu, komitmen Surakarta untuk melestarikan bangunan dan landmark bersejarahnya menunjukkan dedikasinya terhadap pelestarian warisan, berkontribusi pada daya pikatnya sebagai kota yang memadukan masa lalu dengan masa kini dengan mulus. Kehadiran kewirausahaan kreatif dan berkembangnya usaha kecil dan menengah semakin meningkatkan daya saing kota, mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengembangan infrastruktur berkualitas tinggi, termasuk jaringan transportasi modern dan perhotelan, menempatkan Surakarta sebagai tujuan pilihan, menawarkan pengalaman yang lancar dan nyaman bagi penduduk dan pengunjung.

Sebagai hasil dari aspek, pilar, dan dimensi yang luar biasa ini, Kota Surakarta telah muncul sebagai pesaing yang tangguh di antara pusat-pusat perkotaan lainnya di Jawa Tengah maupun Indonesia. Warisan budaya dan signifikansi sejarahnya tidak hanya berkontribusi pada pengakuan global tetapi juga berfungsi sebagai pendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kehadiran kewirausahaan kreatif dan UKM yang bersemangat menumbuhkan lingkungan bisnis yang dinamis, menarik investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dedikasi kota untuk meningkatkan infrastrukturnya, termasuk pengembangan hotel, restoran, dan fasilitas modern, meningkatkan daya saing dengan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi wisatawan dan investor.

B. Perkembangan Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2022-2023

Peningkatan daya saing Kota Surakarta secara keseluruhan diproyeksikan meningkat pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun peningkatan yang terjadi tidak signifikan, namun daya saing Kota Surakarta diproyeksikan membaik terutama atas perbaikan indikator-indikator yang masih berada di level 1. Dengan fokus yang terus diperkuat pada pengembangan infrastruktur, inovasi, dan pemberdayaan sektor ekonomi, kota Surakarta telah berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan daya saing yang

pernah dialami dari rentang 2019-2020. Peningkatan dapat direpresentasikan baik berdasarkan aspek, pilar, dimensi, maupun masing-masing indikator.

Berdasarkan dimensi, peningkatan dialami pada dimensi “Kewirausahaan” dari skor 4,333 menjadi 4,500. Dimensi “Interaksi dan Keberagaman” juga mengalami peningkatan dari skor 4,833 menjadi 5,00 serta dimensi “Penelitian dan Pengembangan” dari skor 4,900 menjadi 5,000. Kondisi peningkatan ditunjukkan meskipun tidak signifikan pada dimensi “Stabilitas Ekonomi” dimana pada tahun 2022 skornya adalah 3,826 dan di tahun 2023 menjadi 3,429. Upaya peningkatan kredit usaha dan kredit yang disalurkan terhadap UMKM juga turut mendorong dimensi “Akses Keuangan” di mana pada tahun 2022 skornya adalah 4,000 dan di tahun 2023 menjadi 4,333.

Tabel 5.2 Proyeksi Peningkatan Skor Daya Saing Kota Surakarta 2022-2023 Berdasarkan Dimensi

Dimensi	2022	2023
Regulasi	3,750	3,750
Kewirausahaan	4,333	4,500
Interaksi dan Keberagaman	4,833	5,000
Penelitian dan Pengembangan (R & D)	4,900	5,000
Komersialisasi	5,000	5,000
Telematika	5,000	5,000
Teknologi	5,000	5,000
Tata Kelola Pemerintahan	4,000	4,000
Keamanan dan Ketertiban	5,000	5,000
Infrastruktur Transportasi	4,000	4,000
Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	4,000	4,000
Keuangan Daerah	3,250	3,250
Stabilitas Ekonomi	3,286	3,429
Kesehatan	4,500	4,625
Pendidikan	2,857	2,857
Keterampilan	5,000	5,000
Kompetisi Dalam Negeri	5,000	5,000
Pajak dan Retribusi	3,000	3,000
Stabilitas Pasar	3,500	3,500
Ketenagakerjaan	3,667	3,667
Kapasitas tenaga kerja	5,000	5,000
Akses Keuangan	4,000	4,333
Ukuran Pasar	3,667	3,667

Berdasarkan pilar, proyeksi peningkatan terjadi pada pilar “Dinamika Bisnis” dimana pada tahun 2022 Kota Surakarta meraih skor 4,042 meningkat menjadi 4,125 di tahun 2023. Pada pilar “Kapasitas Inovasi” terjadi peningkatan dari 4,911 di tahun 2022 menjadi 5,000 di tahun 2023. Pilar “Perekonomian Daerah” juga mengalami peningkatan, di mana pada

tahun 2022 skor perekonomian daerah adalah 3,268 meningkat menjadi 3,339 pada tahun 2023. Sementara itu, pilar “Kesehatan” menunjukkan perbaikan di mana pada tahun 2022 skornya adalah 4,500 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4,625. Terakhir, pilar “Akses Keuangan” mengalami kenaikan cukup signifikan dari 4,000 di tahun 2022 menjadi 4,333 di tahun 2023.

Tabel 5.3 Proyeksi Peningkatan Skor Daya Saing Kota Surakarta 2022-2023 Berdasarkan Pilar

Pilar		
Dinamika Bisnis	4,042	4,125
Kapasitas Inovasi	4,911	5,000
Kesiapan Teknologi	5,000	5,000
Kelembagaan	4,500	4,500
Infrastruktur	4,000	4,000
Perekonomian Daerah	3,268	3,339
Kesehatan	4,500	4,625
Pendidikan dan Keterampilan	3,929	3,929
Efisiensi Pasar Produk	3,833	3,833
Ketenagakerjaan	4,333	4,333
Akses Keuangan	4,000	4,333
Ukuran Pasar	3,667	3,667

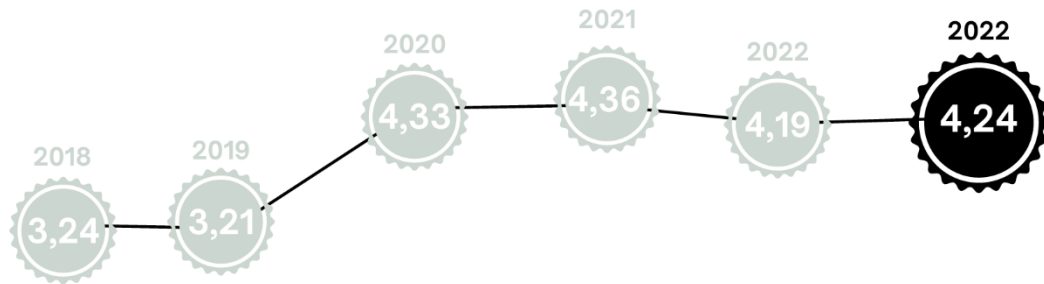
Proyeksi peningkatan daya saing berdasarkan pilar direpresentasikan oleh pilar “Ekosistem Inovasi” yang meningkat dari skor 4,651 di tahun 2022 menjadi 4,708 di tahun 2023. Aspek “Penguat/ *Enabling Environment*” juga mengalami peningkatan dari skor 3,923 di tahun 2022 menjadi 3,946 di tahun 2023. Aspek “Sumber Daya Manusia/ *Human Capital*” mengalami peningkatan dari skor 4,214 di tahun 2022 menjadi 4,277 di tahun 2023. Sementara itu aspek “Pasar/ *Market*” meningkat dari skor 3,958 di tahun 2022 menjadi 4,042 di tahun 2023.

Tabel 5.4 Proyeksi Peningkatan Skor Daya Saing Kota Surakarta 2022-2023 Berdasarkan Aspek

Aspek		
Ekosistem Inovasi	4,651	4,708
Faktor Penguat/Enabling Environment	3,923	3,946
Sumber Daya Manusia/Human Capital	4,214	4,277
Faktor Pasar/Market	3,958	4,042

Skor daya saing Kota Surakarta secara keseluruhan pada tahun 2023 adalah 4,24 meningkat dibandingkan dengan skor tahun 2022 yaitu 4,19. Peningkatan ini merupakan indikasi positif mengingat tren peningkatan skor daya saing Kota Surakarta sempat terputus

pada tahun 2022. Meskipun belum mencapai pada titik tertinggi seperti yang pernah diraih pada tahun 2021 yaitu 4,36, peningkatan skor daya saing dari tahun 2022 ke 2023 diharapkan menjadi pemicu untuk perbaikan daya saing Kota Surakarta di tahun-tahun yang akan datang.



Gambar 5.4 Skor Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2018-2023

Kota Surakarta mengantisipasi beberapa hasil positif dari peningkatan skor daya saing daerah secara keseluruhan. Pertama, skor daya saing yang tinggi akan memperkuat posisi Surakarta sebagai tujuan investasi yang menarik, baik domestik maupun internasional. Kota Surakarta mengharapkan untuk menarik masuknya modal yang lebih besar, yang mengarah ke peningkatan kegiatan bisnis, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan skor daya saing yang lebih tinggi, Surakarta bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kewirausahaan dan inovasi, mendorong ekosistem bisnis yang berkembang yang mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kedua, skor daya saing daerah yang meningkat akan meningkatkan reputasi Kota Surakarta di kancah global. Kota ini telah memulai untuk menempatkan diri dalam pengakuan dan visibilitas yang lebih besar, memposisikan Kota Surakarta sebagai pemain kunci di pasar regional, nasional dan internasional. Pengakuan ini tidak hanya akan menarik lebih banyak wisatawan tetapi juga memfasilitasi kemitraan dan kolaborasi dengan entitas global, sehingga memperluas jaringan dan pengaruh Surakarta. Keunggulan daya saing ini diharapkan dapat meningkatkan aliansi strategis, menarik investasi asing langsung, dan keterlibatan dalam inisiatif pertukaran pengetahuan, yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong kemakmuran jangka panjang Kota Surakarta.

BAB VI

SOLUSI MENYELURUH

A. Agenda Kerjasama dan Kolaborasi (Internal dan Eksternal Daerah)

Berdasarkan hasil pengisian terhadap kuesioner Pemetaan Daya Saing Daerah tahun 2023, masih terdapat 6 indikator yang menempatkan Kota Surakarta pada level 1. Dengan kata lain, masih terdapat 6 indikator yang masih perlu untuk ditingkatkan dan dioptimalkan untuk memperbaiki kemampuan daya saing berkelanjutan Kota Surakarta di level nasional bahkan untuk bersaing di taraf internasional. Mengacu pada 6 indikator yang masih memperoleh skor atau level 1, beserta temuan-temuan lapangan dan juga data desk yang dijadikan sebagai data dukung pengisian kuesioner daya saing regional pada sistem BRIN, perlu sinergi yang kuat antara akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, komunitas, dan media dalam meningkatkan indikator-indikator tersebut. Adapun indikator yang masih perlu untuk ditingkatkan antara lain:

1. Persentase penurunan/ peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya (indikator nomor 47). PAD Kota Surakarta terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 34% dan pada tahun 2021 sebesar 15% atau mengalami peningkatan persentase sebesar 56%. Untuk meningkatkan persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, perlu adanya kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dengan Kantor Pajak Pratama Surakarta terutama dalam mempromosikan insentif pajak baik kepada perorangan maupun dunia usaha. Kolaborasi dapat melibatkan juga pusat studi perguruan tinggi dalam melakukan analisis dan kajian potensi pendapatan daerah, termasuk analisis potensi ketidaktepat sasaran pajak atau retribusi.
2. Nilai investasi berskala nasional PMA Kota Surakarta sebesar US\$ 1.651.200 Untuk mencapai level 2 Kota Surakarta perlu memperoleh investasi berskala nasional PMA antara US\$ 250.000.000-500.000.000. Strategi untuk peningkatan investasi berskala PMA antara lain:
 - 1) Melakukan penelusuran dan inventarisasi terhadap perusahaan-perusahaan digital dengan status kepemilikan luar negeri;
 - 2) Perbaikan dan pengembangan dalam ease of use, daya tarik visual, dan prosedur pengurusan yang singkat pada *Online Single Submission* (OSS) untuk menarik investor asing;

- 3) Melakukan penelusuran dan inventarisasi terhadap universitas-universitas di Surakarta yang memiliki mahasiswa dari luar negeri, serta transaksi tenaga ahli atau profesional yang jasanya digunakan oleh perusahaan/ instansi dari luar negeri; dan
 - 4) DPMPTSP telah melakukan usaha pencatatan aktivitas perdagangan, termasuk ekspor-impor secara online melalui lapak online, namun perlu diperdalam lagi terutama dalam kegiatan pencatatan pada perusahaan/ pengusaha yang melakukan kegiatan titip ekspor (melalui kota lain).
3. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi Jawa Tengah, yang dijadikan acuan untuk Kota Surakarta adalah sebesar 22,86% atau masih jauh dari angka 40% untuk mencapai level 2. Beberapa kolaborasi yang bisa dilakukan oleh Kota Surakarta antara lain:
- 1) Kolaborasi antara Pemerintah Kota Surakarta, lembaga pendidikan, dan sekolah-sekolah: Dengan bekerja sama secara aktif, pemerintah, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah dapat mengadakan program-program yang mendorong siswa untuk mempersiapkan diri dan memperoleh informasi mengenai perguruan tinggi. Ini dapat mencakup pameran pendidikan, seminar, lokakarya, dan kegiatan orientasi yang memperkenalkan siswa pada pilihan pendidikan tinggi.
 - 2) Kolaborasi antara perguruan tinggi dan perusahaan: Perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal untuk menyediakan program magang, pelatihan kerja, dan kesempatan kerja langsung setelah lulus. Dengan demikian, siswa akan melihat manfaat langsung dari melanjutkan pendidikan tinggi dan akan lebih termotivasi untuk mengikuti pendidikan tinggi.
 - 3) Kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat: Kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat yang berfokus pada pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi dan memberikan bantuan finansial atau beasiswa kepada siswa berprestasi namun kurang mampu.
 - 4) Kolaborasi dengan lembaga pendidikan di luar negeri: Perguruan tinggi di Surakarta dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa atau program

ganda yang memungkinkan mahasiswa Surakarta untuk mendapatkan pengalaman internasional dan perspektif yang luas.

- 5) Kolaborasi dengan komunitas lokal: Dalam menggalakkan partisipasi kasar perguruan tinggi, penting untuk melibatkan komunitas lokal. Perguruan tinggi dapat mengadakan kegiatan komunitas seperti seminar, pelatihan, atau layanan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi.
4. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta masih di angka 12%, dan untuk meningkat pada level 2 Kota Surakarta perlu kontribusi pajak hingga 14% dari total PAD. Strategi dan kolaborasi yang bisa diupayakan antara lain: Pemerintah Kota Surakarta dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dapat menghasilkan retribusi. Misalnya, kolaborasi dengan perusahaan parkir atau perusahaan pengelolaan fasilitas umum untuk meningkatkan pendapatan dari parkir atau penggunaan fasilitas umum.
 - 1) Melibatkan masyarakat dan komunitas setempat dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar retribusi dan mendorong kepatuhan. Pemerintah Kota Surakarta dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat, seperti lembaga adat, kelompok masyarakat, atau lembaga keagamaan, untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kontribusi mereka dalam bentuk retribusi.
 - 2) Mengintegrasikan pendidikan mengenai kewajiban membayar retribusi ke dalam kurikulum sekolah dapat membantu meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan kota. Pemerintah Kota Surakarta dapat berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di wilayah tersebut untuk menyelenggarakan program-program edukasi dan kesadaran tentang pentingnya membayar retribusi.
 - 3) Pemerintah Kota Surakarta dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atau Dinas Pendapatan Daerah, untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan dalam pengumpulan retribusi. Kolaborasi ini dapat melibatkan penyediaan pelatihan, pertukaran informasi, dan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan pengumpulan dan pemantauan retribusi.

5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Surakarta pada tahun terakhir adalah 7,85 dan untuk mencapai peningkatan level, TPT Kota Surakarta harus diturunkan ke angka <7,00. Kolaborasi yang dapat diupayakan untuk menekan angka TPT adalah:
- 1) Pemerintah Kota Surakarta dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta untuk menciptakan peluang kerja yang lebih banyak. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan menyediakan program magang atau kerja sama pendidikan-industri. Kolaborasi ini akan membantu menghubungkan para pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang tersedia di sektor swasta.
 - 2) Pemerintah Kota Surakarta dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta untuk menciptakan peluang kerja yang lebih banyak. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong perusahaan untuk membuka lowongan pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan menyediakan program magang atau kerja sama pendidikan-industri. Kolaborasi ini akan membantu menghubungkan para pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang tersedia di sektor swasta.
 - 3) Lembaga vokasi dan lulusan dapat bekerja sama dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan melibatkan lulusan dan industri sebagai mitra, lembaga vokasi dapat memastikan bahwa program-program pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan dan permintaan pasar kerja. Hal ini akan mempersiapkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
 - 4) Kolaborasi dalam penyediaan magang dan program praktik kerja: Lembaga vokasi dapat menjalin kerjasama dengan lulusan untuk menyediakan program magang atau praktik kerja di perusahaan-perusahaan lokal. Melalui kolaborasi ini, lulusan dapat memperoleh pengalaman kerja nyata dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Di sisi lain, perusahaan akan mendapatkan tenaga kerja yang terlatih dan siap produktif. Kolaborasi ini juga memungkinkan adanya peluang untuk penempatan kerja langsung setelah program magang atau praktik kerja selesai.

6. Neraca Perdagangan Antar Wilayah merupakan indikator di bawah kewenangan Provinsi, di mana Jawa Tengah berada pada angka US\$ 26,53 juta per Januari 2022. Meskipun di bawah kewenangan provinsi, Kota Surakarta dapat mendukung peningkatan indikator ini melalui:
- 1) Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan: Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan program-program yang mendukung peningkatan kualitas produk dan jasa lokal. Kolaborasi ini dapat mencakup pelatihan keterampilan dan peningkatan produktivitas bagi para pelaku usaha lokal, sehingga mereka dapat menghasilkan produk yang lebih kompetitif dan sesuai dengan standar internasional. Lembaga pendidikan dan pelatihan juga dapat menyediakan program pengembangan kewirausahaan untuk mendorong munculnya bisnis baru yang dapat menghasilkan ekspor.
 - 2) Kolaborasi dengan perusahaan ekspor dan importir: Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan ekspor dan importir untuk meningkatkan akses pasar bagi produk lokal. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan informasi pasar, bimbingan dalam pemenuhan persyaratan ekspor, dan promosi bersama produk lokal di pasar internasional. Dengan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki jaringan dan pengalaman dalam perdagangan internasional, pelaku usaha lokal dapat lebih mudah mengakses pasar global.
 - 3) Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan: Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan inovasi dan daya saing produk lokal. Kolaborasi ini dapat melibatkan dukungan dalam penelitian dan pengembangan produk baru, peningkatan kualitas dan efisiensi produksi, serta pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan menggandeng lembaga penelitian dan pengembangan yang memiliki keahlian dan sumber daya yang memadai, produk lokal dapat menghadapi persaingan global dengan lebih baik.
 - 4) Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan negara-negara mitra: Pemerintah daerah dapat melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan negara-negara mitra untuk memperkuat hubungan perdagangan bilateral. Kolaborasi

ini dapat mencakup penyelenggaraan kunjungan dagang, penandatanganan perjanjian perdagangan, dan fasilitasi perdagangan yang lebih lancar. Dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan negara-negara mitra, pelaku usaha lokal dapat memperluas jangkauan pasar dan memperoleh keuntungan dari akses yang lebih baik ke pasar internasional.

B. Prioritas Program Penyusunan dan Pelaksanaan Penguatan PDSD

Berdasarkan pemetaan pada terhadap keunggulan-keunggulan daya saing maupun indikator yang masih lemah di Kota Surakarta, prioritas program yang dinilai relevan untuk penguatan daya saing Kota Surakarta di tahun mendatang antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Kota Surakarta dapat fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata budaya. Ini termasuk pemeliharaan dan restorasi situs bersejarah, pengembangan pusat seni dan budaya, serta peningkatan aksesibilitas ke objek wisata utama. Dengan infrastruktur yang memadai, Kota Surakarta dapat menarik wisatawan, menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata, dan meningkatkan pendapatan daerah.

2. Pemberdayaan Industri Kreatif

Pemerintah Kota Surakarta dapat mengembangkan program pemberdayaan bagi pelaku industri kreatif. Ini meliputi pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pendampingan dalam pemasaran dan distribusi produk kreatif termasuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Dukungan ini akan membantu pengusaha kreatif lokal untuk meningkatkan kualitas produk, mengadopsi inovasi dan teknologi, serta memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Peningkatan Kolaborasi Pendidikan dan Industri

Pemerintah Kota Surakarta dapat menjalin kerja sama yang erat antara lembaga pendidikan dan industri. Ini dapat dilakukan melalui program magang, kolaborasi riset dan pengembangan, serta penyelenggaraan seminar dan pelatihan industri. Dengan melibatkan industri dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan, lulusan akan lebih siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan industri, serta memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Upaya ini sangat memungkinkan mengingat Kota Surakarta memiliki Kawasan Teknologi yang kuat yaitu *Solo Technopark* yang dapat berperan sebagai inkubator bisnis dan melahirkan *startup-startup* baru.

4. Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Pendukung Bisnis

Untuk menjadikan Surakarta sebagai pusat perdagangan yang lebih kompetitif, penting untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas infrastruktur pendukung bisnis. Pemerintah Kota Surakarta dapat fokus pada pemangkasan birokrasi, penyederhanaan proses perizinan, dan penyediaan infrastruktur fisik seperti jaringan telekomunikasi yang handal, akses transportasi yang baik, serta fasilitas logistik yang efisien. Ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan.

REFERENSI

- Berger, M., Campos, J., Carolli, M., Dantas, I., Forin, S., Kosatica, E., . . . Schlattmann, A. (2021). Advancing the water footprint into an instrument to support achieving the SDGs—recommendations from the “Water as a Global Resources” research initiative (GRoW). *Water resources management*, 35, 1291-1298.
- Catalán, S. G. (2021). Regional competitiveness in Latin America: a comparative study of the key elements for regional performance. *Investigaciones Regionales= Journal of Regional Research*(50), 125-146.
- Chrobocińska, K. (2021). Comparative Analysis of Regional Competitiveness in Poland from 2010–2019 in the Context of the Concept of Sustainable Development. *Sustainability*, 13(6), 3202.
- Judrupa, I. (2021). Regional competitiveness as an aspect promoting sustainability of Latvia. *European Journal of Sustainable Development*, 10(1), 650-650.
- Ketels, C. (2017). Upgrading regional competitiveness: what role for regional governments? In *Handbook of Regions and Competitiveness* (pp. 501-517): Edward Elgar Publishing.
- Korauš, A., Havierníková, K., Gombár, M., Černák, F., & Felcan, M. (2020). Dimensions and their elements affecting the innovative activities of agricultural SMEs toward their sustainable development. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1142.
- Mefi, N. P., & Asoba, S. N. (2021). Sustainable human resource practices for organizational competitiveness post the COVID-19 pandemic. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27(2), 1-7.
- Mishra, P., Pandey, C. M., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., & Keshri, A. (2019). Descriptive statistics and normality tests for statistical data. *Annals of cardiac anaesthesia*, 22(1), 67.
- Nogueira, M. C., & Madaleno, M. (2023). Skill-Biased Technological Change and Gender Inequality across OECD Countries—A Simultaneous Approach. *Economies*, 11(4), 115.
- Parjaman, T., Soedarmo, U. R., & Enas, E. (2019). Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Global. *Journal of Management Review*, 3(3), 29-42.
- Rusnita, T., Yulianto, L., & Albab, U. (2022). Indeks Daya Saing Daerah. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 1(1), 51-72.
- Schwab, K. (2018). *The global competitiveness report 2018*.



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Kampung Baru, Pasar Kliwon
Surakarta, Jawa Tengah, 57111 Telp. (0271) 636 426

Website: litbang.surakarta.go.id | Email: balitbangdaska@surakarta.go.id; balitbangdaska@gmail.com